



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
KOMISI III DPR RI**

- Tahun Sidang : 2020 – 2021  
Masa Persidangan : III (Tiga)  
Rapat ke :  
Jenis Rapat : Rapat Uji Kelayakan (*Fit and Proper Test*) calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, tanggal : Rabu, 20 Januari 2021  
Pukul : 10.09 WIB s.d. 13.26 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI  
Ketua Rapat : Herman Hery  
Sekretaris : Novianti, S.E.  
Acara :  
1. Uji Kelayakan (*Fit and Proper Test*) calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan  
2. Pengambilan keputusan (Pandangan Fraksi-fraksi) Uji Kelayakan (*Fit and Proper Test*) calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Hadir : **A. Anggota DPR RI :**  
50 dari 55 orang Anggota dengan rincian:

**PIMPINAN**

5 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan:

1. Herman Hery
2. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum.
3. H. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H
4. Ahmad Sahroni, S.E., M.I. Kom
5. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN:**

11 orang dari 11 orang Anggota:

1. Ichsan Soelistio
2. Johan Budi Sapto Pribowo (virtual)
3. Trimedya Panjaitan (virtual)
4. M. Nurdin
5. Gilang Dhielafararez (virtual)
6. Idham Samawi (virtual)

/7. Bambang D.H (virtual)

7. Bambang D.H (virtual)
8. Arteria Dahlan (virtual)
9. I Wayan Sudirta
10. Agustiar Sabran (virtual)
11. H. Safaruddin

**2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:**

5 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si (virtual)
2. Ir. H. Sari Yulianti, M.T
3. H. Rudy Mas'ud, S.E
4. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn
5. Supriansa, S.H., M.H

**3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:**

5 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H
2. Muhammad Rahul (virtual)
3. Bambang Haryadi, S.E (virtual)
4. Wiyadi Wiyanto
5. Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H

**4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:**

5 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Eva Yuliana, M.Si
2. Taufik Basari, S.H., M.Hum, L.L.M (virtual)
3. Ary Eghani Ben Bahat, S.H (virtual)
4. Ahmad H.M Ali, S.E
5. Rusdi Masse Mappasessu

**5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**

5 orang Anggota dari 6 orang Anggota:

1. H. Moh Rano Al Fath, S.H., M.H
2. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P
3. H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A (virtual)
4. Ruslan M. Daud
5. N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S. H., M.Kn

**6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

4 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS
2. H. Santoso, S.H (virtual)
3. Didik Mukrianto, S.H., M.H
4. Dr. Benny Kabur Harman, S.H

*/7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA*

**7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**

5 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Habib Aboe Bakar Al Habsyi, S.E (virtual)
2. Drs. H. Adang Daradjatun (virtual)
3. Dr. H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H
4. K.H Aus Hidayat Nur
5. H. Muhammad Nasir Djamil, M.Si

**8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**

3 orang Anggota dari 3 orang Anggota:

1. Sarifudin Sudding, S.H., M.H
2. H. Nazaruddin Dek Gam
3. Mulfachri Harahap, S.H., M.H

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

2 orang Anggota dari 2 orang Anggota:

1. H. Arsul Sani, S.H., M.Si
2. DR. H.M Amir Uskara, M.Kes

**B. Undangan:**

Komjen Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si beserta jajaran

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (HERMAN HERRY):**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*  
Salam sejahtera bagi kita semua

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi III  
Hadir pula Pimpinan DPR Pak Sufmi Dasco  
Yang terhormat Calon Kapolri Komjen. Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.  
Serta hadirin yang kami muliakan

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas perkenannya kita dapat melaksanakan dan menghadiri Uji Kelayakan atau *Fit and Proper Test* Calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada hari ini secara fisik dan *virtual* dalam keadaan sehat *wal afiat*.

Sesuai dengan laporan Sekretariat rapat hari ini berdasarkan daftar hadir telah hadir secara fisik sebanyak 37 Anggota dari 9 Fraksi. Oleh sebab itu, kuorum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 Ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib maka perkenankan kami membuka Uji Kelayakan atau *Fit and Proper Test* ini Calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DI BUKA PUKUL 10.09 WIB)

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI  
Serta calon Kapolri

Kami menyampaikan terima kasih kepada calon Kapolri atas kesediaannya memenuhi undangan kami, demikian juga kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III kami mengucapkan terima kasih. Sebelum memulai Uji Kelayakan Pimpinan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri memiliki tugas dan fungsi yang strategis dalam menjalankan fungsi Pemerintahan Negara di Bidang Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Penegakan Hukum, Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Kepada Masyarakat. Maka dari itu, posisi Kapolri merupakan jabatan yang sangat strategis selaku pemegang komando tertinggi organisasi Polri.
2. Mengacu Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dua cabang kekuasaan negara yang memiliki tugas strategis dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dalam hal itu ini yaitu Presiden dan DPR. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang tentang Polri, Presiden Republik Indonesia mengajukan nama calon Kapolri ke DPR.
3. Selanjutnya DPR dapat menyetujui atau menolak usulan Presiden tersebut. Maka dari itu, proses *Fit and Proper Test* ini akan menjadi proses terakhir dalam rangka dalam rangkaian pengangkatan calon Kapolri. Proses ini sekaligus merupakan tugas dan tanggung jawab konstitusional kami selaku Anggota DPR dalam menyuarakan aspirasi sekaligus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
4. Selanjutnya kami sampaikan bahwa berdasarkan Pasal 226 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI menegaskan bahwa dalam hal Peraturan Perundang-Undangan menentukan agar DPR mengajukan memberikan persetujuan atau memberikan pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu jabatan, Rapat Paripurna DPR menugasi Badan Musyawarah untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya kepada Komisi terkait. Berdasarkan surat Presiden Nomor R02/Pres/01/2021 tanggal 9 Januari 2021 perihal pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan Kapolri dan berdasarkan keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 19 Januari 2021 Komisi III DPR RI ditugaskan untuk membahas Uji Kelayakan Calon Kapolri yang diusulkan oleh Presiden.
5. Atas dasar itu Komisi III DPR RI melaksanakan kegiatan Uji Kelayakan Calon Kapolri, adapun kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu:
  - a) Calon Kapolri menyampaikan arah kebijakan Kapolri.
  - b) Dialog dan tanya jawab kemudian penandatanganan surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi III dan surat itu diserahkan kepada kami.
  - c) Pandangan Fraksi-Fraksi atau pengambilan keputusan persetujuan atau penolakan usul pengangkatan calon Kapolri yang diajukan oleh Presiden.
6. Dalam menyampaikan arah kebijakan kepada calon Kapolri kami berikan waktu maksimum 60 (enam puluh) menit.

7. Hak mengajukan pertanyaan dilakukan oleh 1 (satu) orang perwakilan Fraksi kepada calon Kapolri dilakukan paling lama 5 (lima) menit yang pelaksanaan diatur oleh Pimpinan Rapat, jawaban langsung diberikan oleh Calon Kapolri per tiga pertanyaan per tiga Fraksi jadi total ada sembilan Fraksi, kami akan pecah jadi tiga klaster. Klaster pertama, kedua, dan ketiga.
8. Calon Kapolri menandatangani surat pertanyaan yang disiapkan Komisi III DPR RI dan membacakan surat tersebut yang telah ditandatangani kemudian calon Kapolri dapat meninggalkan ruang rapat.
9. Selanjutnya Komisi III DPR RI melakukan pembahasan persetujuan atau penolakan usul pengangkatan calon Kapolri yang diajukan Presiden dengan mekanisme sebagai berikut:
  - 1) Masing-masing Fraksi melalui Juru Bicaranya menyampaikan pandangannya terhadap usul pemberhentian dengan hormat dari Jabatan Kapolri atas nama Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si. dan pengangkatan sebagai Kapolri atas nama Komjen Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.
  - 2) Apabila dalam pengambilan keputusan tidak diperoleh kesepakatan secara aklamasi maka akan ditempuh dengan cara forum lobi, bila tidak diperoleh kesepakatan juga dalam lobi maka akan dilakukan pemungutan suara atau *voting* secara tertutup.

Demikian pengantar kami untuk mengawali jalannya pelaksanaan Uji Kelayakan ini pada sesi pertama kami berikan kesempatan kepada calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyampaikan arah kebijakannya paling lama 60 menit, kami persilakan.

**CALON KAPOLRI (Komjen Pol. Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.):**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*  
*Shalom*  
*Om Swastiastu*  
*Namo Buddhaya*  
Salam Kebajikan  
Salam sejahtera bagi kita sekalian

Yang saya muliakan Ketua Komisi III DPR RI  
Wakil Ketua Komisi III DPR RI  
Seluruh Anggota Dewan Komisi III DPR RI yang saya muliakan baik yang ada di dalam ruangan ini yang dan tentunya juga yang sedang mengikuti kegiatan ini dalam kegiatan yang bersifat *virtual*  
Dan hadirin sekalian yang berbahagia

Sebelum kami mulai mohon izin dalam kegiatan uji kelayakan ini kami laporkan bahwa kami didampingi oleh Bapak Wakapolri, Bapak Kabaharkam Polri, Bapak Kalemdiklat Polri, Kadiv Propam, kemudian Kapolda Aceh, Kapolda Sulut, kemudian ada Ibu Ida Oetari, kemudian Junior kami Ahrie Sonta Kapolres, kemudian staf kami Firli dan 2 operator. Mohon izin Bapak yang hadir mendampingi kami ini susunannya adalah urutan Senior Pak mulai

dari 87, 88, 89, 90, kami sendiri 91 beserta *letting* kami dan adik-adik kami Pak. Jadi mohon izin kami melaporkan bahwa saat ini Polri solid Pak.

Baik kami lanjutkan Pak. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala berkat dan rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam forum yang mulia ini untuk menjalankan amanah konstitusi dalam rangka Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diselenggarakan dengan melaksanakan protokol kesehatan, terima kasih kami ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu Anggota Dewan atas kesempatan saya sehingga kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan konsep, pemikiran, serta program kepemimpinan apabila saya dengan izin Tuhan Yang Maha Esa diberikan amanah untuk menjadi Kapolri.

Sebelum memulai penyampaian materi tentu izinkanlah kami untuk menghaturkan dukacita yang sangat mendalam kepada Saudara-saudara kita yang saat ini tengah mengalami bencana di Sulawesi Barat, di Kalimantan Barat mohon maaf di Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Jawa Timur tentunya kita berdoa semoga Saudara-saudara kita segera terlepas dari musibah tersebut dan tentunya kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang menghadapi situasi pandemi Covid-19 sehingga kita semua tetap diberikan kekuatan dan kesehatan untuk bisa segera kembali masuk ke dalam situasi kehidupan normal untuk melanjutkan pembangunan nasional yang dapat terus berlangsung dan menuju Indonesia Maju.

Anggota Dewan dan hadirin yang saya muliakan

Dalam rangka ingin mengetahui bagaimana potret Polri di tengah masyarakat bagaimana harapan masyarakat tentang postur Polri, beberapa waktu yang lalu setelah kami ditunjuk oleh Bapak Presiden menjadi calon Kapolri dengan surat resmi yang dikirim ke DPR maka kami melaksanakan kegiatan silaturahmi berkunjung ke tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, sesepuh termasuk juga rekan-rekan yang ada di Partai serta tentunya juga Pimpinan-Pimpinan mantan Kapolri untuk kami ingin mengetahui secara langsung apa harapan masyarakat tentang Polri, bagaimana potret Polri di mata masyarakat karena itu sebagai pijakan kami untuk nantinya kami mengambil langkah-langkah kebijakan terkait dengan program kerja pada saat nanti kami ditunjuk dan diberikan amanah menjadi Kapolri.

Tentunya banyak hal yang kami dapat ada saran, ada masukan, ada kritik dan harapan tentang Polri kedepan bagaimana untuk tetap dapat mewujudkan rasa keadilan, menjadi organisasi yang transparan, dan tentunya potret-potret lain tentang kondisi saat ini yang harus diperbaiki. Sebagai contoh ke depan tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, tidak boleh lagi ada kasus Nenek Minah yang mencuri Kakao kemudian diproses hukum karena hanya untuk mewujudkan kepastian hukum, tidak boleh lagi ada seorang ibu yang melaporkan anaknya kemudian ibu tersebut diproses, dan sekarang sedang berlangsung prosesnya dan akan masuk ke persidangan. Hal-hal seperti ini tentunya ke depan tidak boleh lagi

ataupun tentunya kasus-kasus lain yang mengusik rasa keadilan masyarakat, betul penegakan hukum harus dilakukan secara tegas namun humanis. Di saat ini masyarakat memerlukan penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat bukan penegakan hukum dalam rangka untuk kepastian hukum. Maka dari itu, dalam kepemimpinan saya nantinya sisi-sisi tersebut tentunya akan menjadi fokus utama yang akan diperbaiki sehingga mampu merubah wajah Polri menjadi Polri yang diharapkan masyarakat, Polri yang memenuhi harapan rakyat dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat, berbasis pada hukum yang berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia, serta mengawal proses demokrasi.

Tentunya pelayanan kepada masyarakat akan semakin ditingkatkan dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi, hal ini dimaksudkan agar pelayanan dapat semakin menjangkau seluruh kepentingan masyarakat. Kendala-kendala dalam interaksi akan lebih bisa segera diatasi untuk bisa semakin menjaga dengan meningkatkan marwah Polri, karena apapun yang terjadi bahwa semakin sering terjadi interaksi maka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang itu akan terjadi dan oleh karena itu kedepan kami akan meningkatkan sistem sehingga hal-hal yang sifatnya memunculkan interaksi dan kemudian memunculkan penyalahgunaan wewenang ini kedepan akan kami perbaiki.

Titik berangkat perencanaan kita juga dengan mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19 dan pengaruhnya terhadap stagnasi ekonomi masyarakat maupun konflik di wilayah yang memerlukan pendekatan khusus. Tentunya kita tidak bisa hanya mengedepankan penggelaran kekuatan tetapi juga perlu dikedepankan pendekatan *soft approach* yang akan menjadi bagian utama dalam strategi pemolisian dengan penegakan hukum yang akan menjadi upaya terakhir sebagai *ultimum remedium* manakala proses-proses di awal tidak menemui penyelesaian. Oleh karena itu, bagaimana kedepan kami mewujudkan program membuat program sehingga dapat menciptakan keadilan untuk seluruh lapisan dan golongan masyarakat atau yang biasa disebut dengan *justice for all*.

Anggota Dewan yang kami hormati

Bagi Polri harapan masyarakat merupakan faktor utama dan penting untuk diwujudkan meskipun banyak hal yang harus dihadapi, mulai dari tantangan yang bersumber dari perkembangan lingkungan strategis baik pada tataran global, regional, domestik, serta dinamika sosial yang hidup diruang Siber, sehingga permasalahan kinerja Polri yang masih menuai masukan, koreksi, dan kritik dari berbagai pihak. Kritik berupa persepsi dan isu yang berkembang dan menyoroti kinerja Polri tentunya harus menjadi perhatian serius seperti pelayanan Polri yang dirasakan oleh sebagian masyarakat mungkin masih berbelit-belit, ucapan, sikap dan perilaku anggota yang kasar ataupun arogan yang dirasakan oleh masyarakat, adanya pungli di sektor-sektor pelayanan, kebiasaan suka-suka mencari-cari kesalahan dan mengutamakan kekerasan dalam menyelesaikan suatu masalah, penanganan kasus yang terkesan tebang pilih, keterbukaan dalam proses penanganan tindak pidana dan menampilkan perilaku-perilaku yang menimbulkan

kebencian di masyarakat. Meskipun masih ada pandangan negatif terhadap Polri namun tentunya kami juga mendapatkan gambaran tingkat kepuasan publik terhadap Institusi yang semakin menunjukkan arah optimis. Hal tersebut ditunjukkan oleh hasil survei dari beberapa lembaga survei seperti Markplus Inc yang dilaksanakan pada Januari 2021 apa masyarakat meliputi aspek kompetensi, sikap SDM, sarana, prasarana pendukung, kinerja budaya, serta komunikasi dalam pelayanan mendapatkan hasil cukup baik.

Kemudian berbagai survei dari lembaga yang *credible* yaitu Alfa Riset, LSI, Litbang Kompas menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan Polri masih menempati posisi ketiga dengan demikian secara umum kepuasan dan kepercayaan publik terhadap Polri dinilai oleh beberapa lembaga survei tersebut cukup baik meskipun tentunya perlu ada upaya peningkatan dan penyempurnaan secara sungguh-sungguh. Ke depan Polri tidak akan berhenti menjawab harapan masyarakat dalam posisinya sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dalam negeri. Tampilan, sikap perilaku dan postur Polri yang masih belum sesuai dengan harapan masyarakat harus diubah. Oleh karena itu, apabila saya diberikan amanah untuk menjadi Kapolri transformasi Polri akan saya lakukan dengan transformasi menuju Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi yang berkeadilan yang kami perkenalkan sebagai konsep Polri yang PRESISI. Niat pemikiran dan konsep operasional disertai dengan rencana yang *real* dan rasional dari Polri yang PRESISI ini akan menjadi dasar dan kekuatan untuk mewujudkan harapan masyarakat tersebut, konsep inilah yang akan mewarnai Polri masa depan. Konsep transformasi menuju Polri yang PRESISI hadir melalui penekanan pada upaya pendekatan pemeriksaan yang prediktif yang diharapkan bisa membangun kejelasan dari setiap permasalahan keamanan dalam menciptakan peraturan sosial di tengah-tengah masyarakat. Pendekatan ini juga akan mentransformasi wajah Polri ke depan, antara lain pada pelayanan publik yang terintegrasi, modern, mudah dan cepat. Pemeliharaan Kamtibmas dan penegakan hukum yang prediktif, bertanggung jawab, transparan, serta menjamin rasa keadilan masyarakat.

Konsep prediktif ini diimplementasikan dalam model pemolisian prediktif atau *predictive policing* yang mengedepankan kemampuan untuk mampu memprediksi situasi dan kondisi yang menjadi isu dan permasalahan serta potensi gangguan Kamtibmas melalui prediksi yang didasarkan pada analisa fakta, data dan informasi yang tentunya didukung dengan kemajuan dan perkembangan teknologi informasi sehingga tindakan Kepolisian akan lebih tepat dan mampu menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Responsibilitas dimaknai sebagai rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam ucapan, sikap, perilaku dan responsif dalam pelaksanaan tugas yang secara keseluruhan ditujukan untuk menjamin kepentingan dan harapan masyarakat dalam menciptakan keamanan, sedangkan transparansi berkeadilan tentunya merupakan realisasi dari prinsip, cara berpikir dan sistem yang terbuka, akuntabel, humanis, dan kami terbuka untuk diawasi sehingga pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian akan dapat menjamin keamanan dan rasa keadilan masyarakat.

Anggota Dewan dan hadirin yang saya muliakan

Transformasi menuju Polri yang PRESISI berangkat dari intisari kebijakan Pemerintah dalam rangka Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 sampai dengan 2025 yang berjalan paralel dengan *grand strategy* Polri 2005 sampai dengan 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 sampai dengan 2024 yang dijabarkan dalam Renstra Polri tahun 2020 sampai dengan 2024 5 Program Prioritas Pembangunan Tahun 2009 sampai 2019 sampai 2024 serta tentunya berbagai arahan dari Bapak Presiden Jokowi kepada jajaran Polri. Tentunya seluruh dasar acuan tersebut selaras dengan upaya untuk mewujudkan Indonesia yang lebih produktif dan berdaya saing menuju Indonesia Maju, sedangkan secara institusional konsep transformasi menuju Polri yang PRESISI seiring dengan keberlanjutan para Kapolri sebelumnya dimana saat ini kita berada dalam tahap akhir dari *clean* strategi Polri yaitu tahap *excellent*. Seperti diketahui sebelumnya Bapak Badrodin Haiti mengeluarkan konsep Program Pemetaan, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Tito Karnavian Program Promoter dan Bapak Idham Azis Program Penguatan Promoter. Oleh karena itu di masa kami apabila kami diberikan amanah maka kami akan tindak lanjuti dengan program kami yaitu Transformasi Menuju Polri yang PRESISI.

Konsep Transformasi Menuju Polri yang PRESISI dilaksanakan pada 4 bidang yaitu transformasi di bidang organisasi, transformasi di bidang operasional, transformasi di bidang pelayanan publik, dan transformasi di bidang pengawasan. Keempat transformasi tersebut melahirkan serangkaian program prioritas yang dapat saya uraikan sebagai berikut:

Di Bidang Transformasi Organisasi dilakukan agar organisasi Polri mampu menghadapi tantangan tugas, memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel dan terpadu. Transformasi Organisasi melalui 4 (empat) program yaitu:

1. Program Penataan Kelembagan

Secara fundamental antara lain diwujudkan dengan penguatan Polres dan Polsek sebagai lini terdepan pelayanan Polri, melalui pemenuhan satu kecamatan dan satu Polsek yang kami lakukan secara bertahap, serta menjadikan Polsek sebagai basis resolusi dengan memprioritaskan kegiatan Harkamtibmas sehingga ke depan di beberapa Polsek-polsek tertentu tidak lagi kita bebankan dengan tugas penyidikan sehingga di Polsek-polsek tersebut nantinya hanya dibebani dengan tugas pre-entif dan preventif dan juga penyelesaian-penyelesaian masalah dengan cara *restorative justice*. Untuk penegakan hukum di wilayah-wilayah tertentu secara bertahap akan ditarik ke tingkat Polres sehingga dengan demikian kami harapkan sosok Polsek di era ke depan akan lebih dekat dengan masyarakat karena mereka melakukan upaya-upaya yang bersifat pencegahan, mereka melakukan upaya-upaya pemecahan masalah dengan musyawarah, dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat *restorative justice* dan hal-hal yang tentunya mengutamakan kegiatan-kegiatan yang menghindari penegakan hukum.

Selain itu penguatan struktur organisasi Polri juga dilakukan dengan pengembangan SOTK yang berorientasi pada tantangan tugas ke depan

terutama dalam menghadapi kejahatan Siber, kejahatan korupsi, kejahatan berintensitas tinggi, penanganan bencana alam, konflik sosial dan kejahatan lainnya. Ke depan karena memang kejahatan Siber ini menjadi tantangan maka di level Polda tentunya akan ada Direktorat tersendiri, demikian juga nanti di Polres yang khusus menangani, kemudian terkait dengan korupsi nah kami akan mengembangkan sehingga di dalamnya ada fungsi pencegahan, fungsi penyelidikan, di luar tentunya fungsi penegakan hukum. Ke depan Satker-Satker lain juga akan terus kita kembangkan diantaranya dengan penguatan struktur pada fungsi Brimob serta fungsi penanganan kejahatan-kejahatan lain. Termasuk pengembangan struktur pada tingkat Polda dan Polres karena tanpa penguatan struktur tersebut maka Polri tidak akan optimal dalam merespon harapan masyarakat khususnya terkait dengan penambahan-penambahan kekuatan atau pemekaran atau pendirian pos-pos Kepolisian di daerah-daerah yang saat ini menjadi prioritas Program Pemerintah terkait dengan pengembangan-pengembangan baik itu pengembangan investasi, rencana pemekaran wilayah di beberapa tempat, kawasan ekonomi khusus dan sebagainya yang tentunya perlu ada kehadiran Polri.

Kemudian hal yang juga menjadi perubahan adalah di bidang pelayanan publik, dalam rangka menjadikan Polri sebagai organisasi yang lebih melayani maka perlu dilakukan penataan ulang HTCK di bidang pelayanan. Penataan ini dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara mudah, cepat, transparan, akuntabel dan tentunya terpadu.

2. Program Perubahan Sistem dan Metode Organisasi  
Dilakukan dengan menyempurnakan regulasi dan pedoman yang berorientasi pada pelayanan berbasis data dan teknologi informasi yang PRESISI, sehingga transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Hal ini tentunya untuk menjawab tantangan *Police 4.0* yang selalu mengedepankan teknologi informasi dan meminimalisir interaksi langsung yang mungkin terjadinya memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang.
3. Program untuk Menjadikan SDM Polri yang Unggul di Era 4.0  
Dilakukan dengan kegiatan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Polri melalui pemantapan rekrutmen proaktif dimana Polri secara aktif melakukan jemput bola, mencari dan mendapatkan SDM yang memiliki talenta khusus, memiliki prestasi terlebih yang memiliki kemampuan teknologi namun tentunya tetap mengakomodir putra putri di pulau terluar dan suku asli untuk menjadi anggota Polri dimana mereka nanti kita rekrut karena memiliki kemampuan khusus dan nanti kedepannya kita tugaskan kembali ke wilayah dan melaksanakan tugas sebagai Bhabinkamtibmas.

Upaya mewujudkan SDM yang unggul melalui penataan kembali kurikulum dan mutu pendidikan lembaga pendidikan sehingga menjadi standar Polisi yang berkelas dunia atau *World Class Standard*, serta perluasan kerja sama pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri.

Diharapkan SDM Polri memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan keunggulan yang dimiliki oleh seluruh personil.

Kemudian pemenuhan jumlah personil sesuai kebutuhan prioritas juga menjadi konsen dengan mempertimbangkan karakteristik kerawanan daerah termasuk tentunya pemenuhan Bhabinkamtibmas yang memiliki kemampuan komunikasi dan penggunaan teknologi informasi pada satu desa, satu kelurahan, satu Bhabinkamtibmas. Kehadiran Bhabinkamtibmas di seluruh pelosok negeri tentunya akan menjadi *problem solver* terhadap permasalahan Kamtibmas yang terjadi di masyarakat.

Dalam rangka memenuhi hak penyandang disabilitas, Polri juga akan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berkebutuhan khusus untuk mengabdikan sebagai ASN Polri sesuai kompetensi. Mereka nanti bisa bertugas di bidang administrasi, di bidang pelayanan-pelayanan, analisa yang terkait dengan teknologi informasi atau pun disesuaikan dengan posisi-posisi yang memungkinkan untuk saudara-saudara kita tersebut.

Penataan pengelolaan SDM melalui peningkatan sistem manajemen karir berbasis kinerja dilaksanakan dengan sistem kredit poin sehingga dalam hal ini tentunya akan berbeda penilaian seorang yang memiliki kinerja sebagai penjinak bom dengan seorang pelaksana yang tentunya hanya melaksanakan tugas rutin tentunya tidak sama penilaian kinerja seseorang yang melaksanakan tugas di daerah-daerah tertentu yang memiliki kerawanan tingkat tinggi seperti Poso dibandingkan dengan di wilayah-wilayah biasa. Penyempurnaan Program Manajemen Talenta untuk mendorong kompetisi yang sehat serta memberikan kesempatan dan panggung yang sama untuk berkarya, termasuk tentunya bagi Polwan yang sampai saat ini masih terbatas, pembinaan karir ini juga dilakukan untuk mempersiapkan kepemimpinan Polri yang melayani dan bersifat transformatif.

Kemudian dalam rangka pengelolaan SDM yang humanis maka peningkatan kemampuan kompetensi perlu dibarengi dengan internalisasi, nilai-nilai etika, mengembangkan hubungan kerja atasan dan bawahan yang berorientasi nilai-nilai Tribrata, Caturprasetya dan mempercepat pembentukan mental dan karakter personil Polri yang berbudaya dan menghormati hak asasi manusia. Ini juga kami inginkan bahwa ke depan kita bisa melahirkan model-model pemimpin yang melayani, pemimpin yang melayani masyarakat, pemimpin yang melayani anak buahnya.

Selanjutnya untuk meningkatkan motivasi dan kinerja maka pemenuhan kesejahteraan personil Polri harus diperhatikan khususnya terkait dengan masalah perumahan, pelayanan kesehatan dan hak-hak pegawai lainnya. Tentunya penambahan Perumahan Polri akan kita laksanakan melalui kerja sama dengan ASABRI, mempersiapkan asrama-asrama dengan Kementerian PUPR, kemudian bagaimana kami nanti akan bekerja sama dengan dunia perbankan dan para pengembang sehingga anak buah kami bisa mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan fasilitas kredit

atau pinjaman untuk mendapatkan rumah-rumah yang tentunya layak untuk anggota kami. Sedangkan peningkatan terkait dengan pelayanan kesehatan melalui standarisasi Rumah Sakit Polri dan tentunya peningkatan kelas Rumah Sakit Polri maupun peningkatan kapasitas dan kemampuan Rumah Sakit Polri dalam penanganan penyakit diharapkan ke depan anggota Polri yang berdinias di daerah terpencil akan bisa mendapatkan pelayanan yang sama dengan teman-temannya yang melaksanakan dinas di daerah perkotaan karena memiliki standar rumah sakit yang sama sehingga tidak perlu repot-repot anggota dari daerah tertentu yang terpencil harus berangkat ke kota untuk mendapatkan standar pelayanan rumah sakit. Ke depan standar ini kami akan buat untuk sama sehingga disamping untuk bisa melayani anggota tentunya juga untuk melayani masyarakat yang ada disekitarnya. Bagaimana kemudian kita menyiapkan anggota kita yang akan masuk ke masa purna untuk dipersiapkan menjadi para pelaku wirausaha ataupun tentunya mereka bisa berkarya di tempat lain yang memang mereka inginkan.

4. Program Perubahan Teknologi Kepolisian Modern di Era *Police 4.0*

Ini memiliki sifat yang mendesak dilaksanakan dalam sebuah *platform* yang *secure*, *safety*, dan *credible* dengan memberikan perhatian khusus dalam penyatuan sistem informasi Kepolisian yang terintegrasi yang dilakukan melalui revitalisasi *command center* Polri termasuk mendorong terbentuknya regulasi yang mewajibkan pemasangan CCTV bagi instansi pemerintah, swasta, masyarakat sehingga bisa dilakukan konektivitas yang terintegrasi. Ke depan, beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah coba di wilayah Sulawesi Selatan kemudian DKI namun ke depan kita ingin bahwa program integrasi ini CCTV yang ada di swasta, di mall, di Pemerintah Daerah, di rumah-rumah, di Lembaga-Lembaga Pemerintah ini bisa kita konekkan sehingga kita akan mempermudah untuk melakukan identifikasi terhadap para pelaku kejahatan yang tertangkap gambarnya oleh CCTV tersebut. Jadi ke depan kita akan mengerjakan program tersebut.

Tidak lupa sebagai upaya mempermudah akses masyarakat dan mempercepat respon Polri ketika dibutuhkan masyarakat maka akan kita lakukan penataan kembali layanan darurat ataupun *hotline* Kepolisian dengan memberlakukan nomor tunggal secara nasional dalam rangka merespon cepat aduan masyarakat. Jadi diharapkan ke depan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan Polri semudah memesan pizza, dimana nomor tunggal ini tentunya akan kami konekkan dengan *Sistem Panic Button* dengan mobil-mobil patroli yang ada sehingga begitu ada masyarakat yang kemudian menghubungi kami maka anggota yang berada di lokasi terdekat dengan masyarakat tersebut bisa segera datang, ini adalah juga bagian dari bentuk respon cepat dari Petugas Kepolisian terhadap masyarakat yang membutuhkan keadilan Polri. Hal ini akan dilaksanakan secara bertahap meliputi dukungan penguatan peralatan sesuai dengan karakteristik kerawanan daerah, bagaimana di daerah konflik, di daerah rawan bencana, kepulauan, perbatasan dan lain-lain yang tentunya memiliki karakteristik wilayah yang membutuhkan sarana

prasarana yang tentunya berbeda dengan wilayah-wilayah yang lebih aman.

Infrastruktur dan Sistem Teknologi Artificial Intelijen dimana proses pengadaannya dilaksanakan secara transparan untuk menampilkan produk yang berkualitas, berbasis kebutuhan dan tentunya mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, ini juga untuk mendorong industri-industri di dalam negeri agar bisa tumbuh. Perubahan dan pengembangan sarana prasarana juga akan berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia dan kelompok rentan antara lain perempuan, anak dan kelompok-kelompok yang berkebutuhan khusus. Jadi bagaimana kita mempersiapkan peralatan-peralatan untuk menghadapi demo misalkan dan pada saat demo tersebut anarkis bagaimana kemudian sarana prasarana dan peralatan yang ada itu tentunya tetap dalam batasan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kemudian pelayanan-pelayanan publik untuk mempersiapkan kelompok-kelompok berkebutuhan khusus ini tentunya akan kami hadirkan di seluruh etalase pelayanan kami.

Kemudian dalam menjawab kebutuhan teknologi Kepolisian modern Puslitbang Polri perlu juga dikembangkan menjadi Pusat Riset Teknologi Kepolisian yang dapat mengintegrasikan hasil penelitian lembaga lain yang ada di lingkungan Polri. Jadi ke depan tentunya Puslitbang bisa betul-betul melaksanakan tugasnya untuk mempersiapkan apa yang diperlukan terkait dengan sarana, prasarana dan juga menguji kajian-kajian sehingga setelah lolos uji itu betul-betul bisa dimanfaatkan, digunakan oleh anggota yang sedang bertugas dengan aman.

Kemudian Transformasi Operasional dilakukan dalam rangka memantapkan kinerja Polri dalam memelihara stabilitas Kamdagri maupun mendukung program-program Pemerintah yang dilakukan dengan 6 (enam) program yaitu:

1. Program Pemantapan Kinerja Harkamtibmas

Dengan mengedepankan pemolisian prediktif yang dititikberatkan pada optimalisasi sistem deteksi aksi berbasis data dan informasi kejadian aktual dalam rangka pemetaan situasi Kamtibmas. Memantapkan interaksi dengan pemangku kepentingan yang berorientasi, partisipasi, dan *problem solving*, memastikan kualitas kehadiran Polri di tengah masyarakat, serta mengoptimalkan program unggulan Polri yang tentunya mengedepankan kearifan lokal seperti Kampung Tangguh, Kampung Siaga, Kampung Bebas Narkoba.

Jadi hal-hal ini bagaimana upaya untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan yang bersifat melibatkan kearifan lokal, partisipasi masyarakat ini akan terus kita lakukan bagaimana dalam situasi seperti ini anggota bisa mengajak partisipasi masyarakat untuk menjaga agar di suatu wilayah tetap bisa mempertahankan dari zona hijau tetap menjadi zona hijau atau menurunkan dari zona merah menjadi zona hijau. Terhadap anggota-anggota yang bisa melakukan ini tentunya ke depan kita akan berikan *reward*.

Kemudian bagaimana penguatan partisipasi masyarakat dalam skema masyarakat informasi di Ruang Siber, dioptimalkan melalui kampanye siber guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan, data pribadi dan budaya etika bermedia sosial tentunya tanpa menutup ruang kreativitas disertai dengan pelibatan Polisi Dunia Maya atau disebut *Virtual Police*. Selama ini masyarakat mengenal *Cyber Police* yang biasanya mereka melakukan penegakan hukum tapi dengan *Virtual Police* maka akan lebih mengarah pada hal-hal yang bersifat edukasi, pembelajaran melibatkan masyarakat, melibatkan *influencer* yang memiliki *follower* cukup banyak untuk memberikan edukasi tentang bagaimana beretika, berbudaya yang baik dalam penggunaan media sosial.

Kemudian pemeliharaan Bhabinkamtibmas juga dilakukan melalui penguatan Bhabinkamtibmas dengan pemanfaatan *personal smart tools* yang diimplementasikan melalui revitalisasi BinMas Online Sistem dan menjadikan Bhabinkamtibmas sebagai sahabat dan pusat informasi bagi masyarakat serta *problem solving*. Jadi bagaimana seorang Bhabinkamtibmas dengan disertai *smarts tools* bisa mendapatkan informasi-informasi dari pusat dan pada saat mereka nanti berhadapan dengan masyarakat mereka bisa menjelaskan tentang kondisi apa yang dihadapi saat ini sehingga masyarakat kemudian bisa memahami dan kemudian bisa melakukan hal-hal sesuai dengan apa yang diharapkan dalam rangka upaya untuk pencegahan terjadinya situasi pelanggaran terhadap Kamtibmas.

Upaya pemeliharaan Kamtibmas dengan pengarusutamaan moderasi beragama dalam memperkokoh NKRI jadi perlu dilakukan kolaborasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas-ormas berbasis keagamaan dan para pemangku kepentingan lainnya termasuk melibatkan para ahli dan *Civil Society* dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat di atas pemahaman Pancasila sebagai ideologi negara yang memberikan jaminan keamanan kepada seluruh masyarakat termasuk tentunya jaminan untuk bisa beribadah. Jadi disini bagaimana upaya Polri untuk bersinergi dengan tokoh-tokoh agama yang ada kalau di wilayah Banten dulu dikenal dengan Sinergi Umara dan Ulama ini akan kita lakukan sehingga ke depan kita bisa mencegah bersinergi dengan masyarakat yang ada terkait dengan hal-hal yang akan berdampak pada intoleransi dan radikalisme.

Kemudian terkait pemeliharaan Kamtibmas dari bahaya terorisme, upaya deteksi aksi menjadi langkah utama untuk mengedepankan pendekatan lunak yang tentunya kita melakukan hal ini bekerja sama dengan BNPT, pelibatan *Civil Society*, tokoh tokoh masyarakat, tokoh agama yang perlu kita optimalkan dan dalam pembinaan masyarakat dengan sasaran kesejahteraan *Psychosocial* dan doktrin, termasuk melibatkan rekan-rekan mantan napiter untuk bisa membantu bantu memberikan edukasi agar masyarakat disekitarnya tidak terpapar aliran baik itu radikalism ataupun ajaran-ajaran yang mengarah kepada *terrorism*. Namun apabila berpotensi mengganggu keamanan dan keselamatan rakyat maka Polri tetap akan melakukan tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kemudian penanganan terhadap gangguan kelompok kriminal bersenjata di samping penggunaan kekuatan dalam bentuk kegiatan operasi yang selama ini kita laksanakan, kita juga akan coba untuk melakukan kegiatan secara sistematis dan berkelanjutan dengan berbasis deteksi dengan mengembangkan potensi masyarakat melalui kegiatan BinMas Pioneer agar kebijakan yang diterapkan berorientasi pada masyarakat dapat mendapatkan legitimasi publik serta tentunya bekerja sama dengan *desk-desk* yang ada. Jadi bagaimana permasalahan di daerah-daerah tertentu yang sebenarnya ada yang masalah utamanya adalah ekonomi jadi bagaimana kemudian kita menggerakkan BinMas Pioneer ini untuk kemudian bisa menumbuhkan jiwa-jiwa dan semangat untuk menjadi petani, *entrepreneur* dan sebagainya. Hal-hal tersebut menjadi wajah baru di luar wajah-wajah pendekatan penggunaan kekuatan yang tentu ini harus dilakukan secara seimbang.

Kemudian Polri menjamin keamanan agenda nasional dan internasional sehingga Pemilu 2024, PON ke-20, MTQ dan *event-event* internasional lainnya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang diprogramkan. Kemudian peningkatan sinergitas dan kolaborasi dengan TNI ini mutlak diperlukan karena melalui kolaborasi kegiatan Harkamtibmas, pendidikan dan pelatihan terintegrasi maupun kegiatan inovatif, pengembangan nilai-nilai integrasi, sampai kepada level pelaksana. Sementara untuk kegiatan-kegiatan yang telah berjalan akan terus kita pertahankan bagaimana kita melakukan pertukaran sekolah, apabila dulu hanya di level Pamen ataupun yang akan masuk ke Patih maka ke depan kita akan laksanakan sampai dengan level pelaksana termasuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya terintegrasi lebih bagaimana latihan-latihan menghadapi bencana dan sebagainya ini untuk menguatkan soliditas TNI Polri.

Sementara sinergitas dan kolaborasi antara lembaga dilakukan untuk memantapkan sinergitas dan kerja sama guna mendukung tugas Polri. Ke depan tentunya Pamswakarsa harus lebih di peran aktifkan dalam mewujudkan Harkamtibmas jadi kita hidupkan kembali dan tentunya kita integrasikan dengan perkembangan teknologi informasi dan fasilitas-fasilitas yang ada di Polri sehingga kemudian bagaimana bangsa-bangsa ini bisa tersambung ataupun terkoneksi dengan petugas-petugas Kepolisian.

Pemeliharaan Kamtibmas juga dilakukan melalui pengembangan kerja sama internasional baik untuk pengamanan batas wilayah, pencegahan kejahatan transnasional dan juga dalam misi perdamaian dunia. Program peningkatan kinerja penegakan hukum dilakukan untuk mewujudkan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan mengedepankan instrumen hukum progresif melalui penyelesaian perkara *restorative justice*, upaya mewujudkan kepastian hukum dilakukan dengan memberikan ruang yang lebih luas dalam implementasi keadilan *restorative* dan *problem solving*, penegakan hukum hanya sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian masalah-masalah tertentu manakala di dalam prosesnya mengalami kebuntuan. Jadi ini adalah wajah baru yang akan kita kembangkan, selain itu proses penegakan hukum harus dapat diawasi

melalui optimalisasi *e-management* penyidikan guna menghindari proses hukum atau guna menghindari proses hukum yang berlarut-larut dengan menggunakan elektronik manajemen penyidikan maka masyarakat bisa mendapatkan informasi secara online mengenai perkembangan SP2P bagaimana progres penyidikan dan juga masyarakat bisa menuliskan komplain atau keluhan terkait dengan penanganan kasus yang sedang ditangani oleh penyidik dan ini akan direspon karena ini termonitor oleh para Pimpinan sehingga ini juga sebagai fungsi kontrol.

2. Penegakan hukum tidak boleh mengganggu inovasi dan industri kreatif yang memberikan kontribusi kepada perubahan dan kemajuan kehidupan masyarakat. Jadi tindakan Kepolisian harus dapat mendorong kemajuan bukan mengganggu hadirnya inovasi dan kreativitas yang hidup di masyarakat, sebagai contoh bila masyarakat memiliki kemampuan untuk melakukan inovasi, berkekrativitas kemudian menciptakan suatu produk atau inovasi namun mungkin masyarakat atau saudara kita tersebut belum sempat mengajukan izin.

Jadi Polri di dalam pelaksanaannya jangan kemudian setelah melihat yang seperti itu kemudian main tangkap, tapi ke depan bagaimana kemudian Polri memberikan edukasi dibantu bila perlu untuk bagaimana yang bersangkutan mendapatkan izin, bagaimana kita membantu mengkomunikasikan dengan lembaga yang ada sehingga masyarakat memahami bahwa mereka harus melengkapi izin. Jadi hal-hal seperti ini tentunya akan kita budayakan, tentunya apabila inovasinya ataupun kreativitasnya itu membahayakan kesehatan, membahayakan keselamatan masyarakat maka kita akan tetap lakukan penegakan hukum. Polri juga tidak boleh menjadi alat kekuasaan karena sejatinya Polri adalah alat negara. Oleh karena itu, setiap tindakan Polri harus ditujukan untuk mendukung kemajuan Indonesia dalam bingkai NKRI.

Kemudian khusus di bidang lalu lintas penindakan pelanggaran lalu lintas secara bertahap akan mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik atau biasa disebut dengan ETLE yang bertujuan tentunya untuk mengurangi interaksi dalam proses penilangan guna menghindari terjadinya penyimpanan saat anggota melaksanakan proses tersebut, jadi ke depan saya harapkan anggota lalu lintas turun di lapangan kemudian mengatur lalin yang sedang macet tidak perlu melakukan tilang ini kita harapkan menjadi ikon perubahan perilaku Polri khususnya di sektor pelayanan lini terdepan yaitu anggota-anggota kita di lalu lintas.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi ke depan akan lebih mengutamakan pencegahan dan pemulihan kerugian negara atau *asset recovery* dengan saling mendukung bersama, bersama pihak lain seperti Kejaksaan dan KPK tentu kita terus melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi secara profesional dan proposional. Penegakan hukum tindak pidana *terrorism* dilakukan secara tegas dan terukur namun tentunya dengan tetap menghormati hak asasi manusia. Penanganan dijadikan sarana sebagai re-edukasi melalui pendidikan-pendidikan

dengan melibatkan pesantren-pesantren dan tokoh-tokoh agama untuk ikut terlibat di dalamnya, penanganan kejahatan pada ruang siber yang mengedepankan edukasi kepada masyarakat akan terus ditingkatkan khusus terhadap kasus yang menjadi perhatian masyarakat seperti kejahatan jalanan, kejahatan ekonomi dan tindak pidana narkoba, Polri akan memberikan perhatian khusus dan bertindak tegas tidak ada toleransi dan tidak boleh ada ruang bagi bandar narkoba di negara ini termasuk anggota Polri yang terlibat di dalamnya, pilihannya hanya satu pecat dan pidanakan. Jadi kami tidak main-main dalam hal ini, kami akan buktikan.

Strategi penanganan kejahatan yang berpola jaringan, terorganisir dan menimbulkan kerugian negara penindakannya harus disertai dengan penekanan hukum tindak pidana pencucian uang yang pelaksanaannya bekerja sama dengan JJS dan APH. Di sisi lain penegakan hukum harus dapat mengakomodir kepentingan anak-anak dan wanita serta kelompok rentan lainnya, untuk mendukung penegakan hukum maka pengembangan Pusat Informasi Kriminal Nasional diperlukan untuk terbentuknya sistem *database* kriminal yang terintegrasi baik di lingkungan Polri maupun antar Institusi Penegak Hukum lainnya. Ke depan bagaimana Pusat Informasi Kriminal ini kemudian bisa terintegrasi dengan lembaga-lembaga lain seperti Dukcapil, Imigrasi, Kejaksaan sehingga pada saat kita memberikan pelayanan-pelayanan seperti SKCK semuanya bisa dapat terinformasi dengan lengkap dan tidak parsial.

3. Program Pemantapan Dukungan Polri dalam Penanganan Covid-19  
Dilakukan dengan meningkatkan kegiatan Kepolisian serta menguatkan peran Polri dalam Satgas penanganan Covid-19 melalui pengembangan Program Kampung Tangguh, penegakan hukum yang tegas dan proporsional terhadap pelanggar protokol kesehatan sesuai asas keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi atau Salus Populi Suprema Lex Esto serta tentunya mendukung program vaksinasi nasional.
4. Program Pemulihan Ekonomi Nasional  
Dilakukan dengan mendukung upaya pembelaan ekonomi dan menjaga stabilitas Kamtibmas melalui pendampingan, pengawasan program PEN, aktif memberikan informasi, menjamin kebijakan fiskal dan tentunya berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan.
5. Program Menjamin Keamanan Program Prioritas Nasional  
Dilakukan dengan kegiatan mempersiapkan infrastruktur dan SDM melalui perencanaan kebutuhan anggaran metode dan sarana prasarana untuk melakukan pengamanan terhadap program prioritas nasional antara lain: *Science Techno Park*, pembangunan pipa-pipa gas bumi, pembangunan ibukota negara, transmisi dari pembangkit listrik, pembangunan kilang strategis, upaya pembangunan 10 (sepuluh) destinasi wisata, kawasan ekonomi khusus dan lain-lain. Metode pendampingan dan pengawalan akan terus dievaluasi sehingga mampu menjamin terselenggaranya program prioritas nasional, sedangkan terkait dengan penanganan

bencana alam dilakukan dengan meningkatkan anggaran kontinjensi untuk kegiatan pergeseran pasukan dan pemberian bantuan kepada korban dan tentunya juga pembaharuan terhadap sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan di daerah rawan bencana. Bagaimana kita bisa melakukan kegiatan dan langkah cepat untuk mengirim logistik dan juga mengirim pasukan yang bisa dilakukan secara cepat yang tentunya ini juga perlu ada perbaikan terhadap sarana prasarana untuk mengangkut sehingga kehadiran negara pada saat masyarakat mengalami situasi dan posisi sulit bisa kita atasi dengan kehadiran Polri.

Antisipasi kebakaran hutan dan lahan tetap menjadi program prioritas tahunan Polri, upaya mencegah terjadinya karhutla dilakukan dengan deteksi aksi berbasis data dan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi Geospasial Analisis Center yang terdapat di Mabes Polri yang mampu mengintegrasikan aplikasi yang ada di 6 Polda prioritas yaitu di Riau, di Sumsel, di Jambi, Kalsel, Kalteng dan Kalbar. Selain itu penegakan hukum yang tegas akan menjadi jawaban yang bisa memberikan dampak di tren kepada para pelaku pembakaran. Saya mendorong penegakan hukum karhutla perlu dilakukan dengan pembentukan tim penegakan hukum terpadu karhutla yang tentunya melibatkan personil dari kementerian-kementerian ataupun lembaga terkait.

#### 6. Program Penguatan Penanganan Konflik Sosial

Baik yang bersumber pada perebutan sumber daya ekonomi, politik, sara, sosial, budaya dan ideologi dilakukan dengan peningkatan anggaran kontinjensi dan fasilitas kebutuhan daerah rawan, dari sisi metode perlu dikembangkan olah data hasil pemetaan untuk dapat menyelesaikan akar masalah, membangun mentalitas damai kepada para pihak yang terlibat konflik, sementara itu dari aspek SDM perlu dilakukan peningkatan jumlah personil khususnya Brimob dan Sabhara bagaimana menambah jumlah pasukan, bagaimana mempersiapkan pos-pos baru di daerah rawan-rawan di daerah rawan konflik tersebut.

Transformasi Pelayanan Publik dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengintegrasikan seluruh pelayanan publik seperti penerbitan SIM, STNK, BPKB, SKCK sehingga terwujud pelayanan yang mudah, cepat, transparan dan akuntabel yang dilakukan melalui 3 (tiga) program yaitu:

##### 1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Polri

Dilakukan melalui pengembangan modernisasi teknologi pelayanan publik yang mudah diakses masyarakat, Peningkatan metode pelayanan dan kualitas sumber daya manusia, Penguatan standarisasi sistem manajemen mutu pelayanan yang dilakukan dengan penyederhanaan regulasi dan penyelesaian permasalahan pelayanan yang ada. Bagaimana meningkatkan status WBK dan WBBM pada seluruh sentra pelayanan publik akan terus ditingkatkan secara bertahap untuk mendorong terselenggaranya pelayanan publik dalam rangka reformasi birokrasi. Sebagai terobosan baru dalam modernisasi sistem pelayanan publik diwujudkan dengan menyediakan beberapa pelayanan *online* dan

*delivery system*, jadi tanpa perlu kehadiran masyarakat di lokasi pelayanan Kepolisian maka apa yang di butuhkan oleh masyarakat akan ter-*delivery* tanpa harus hadir di pos-pos yang tentunya di satu sisi mungkin karena jauh, karena kesibukan dan sebagainya.

2. Program Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Terintegrasi  
Melalui pembangunan *Big Data* untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data melalui interkoneksi seluruh fungsi Kepolisian ke dalam *blueprint* program pelayanan publik, menyatukan seluruh pintu pelayan publik dalam satu atap, peningkatan kerja sama dengan media melalui jalur interkoneksi teknologi sehingga aduan masyarakat dapat disalurkan langsung kepada sistem pelayanan dan pengaduan di Kepolisian.
3. Program Pemantapan Komunikasi Publik  
Merupakan pengembangan komunikasi media yang terintegrasi atau biasa disebut dengan Omni Channel dilakukan dengan penguatan sistem komunikasi publik yang dapat mengelola sumber pemberitaan yang proporsional sehingga baik dan berimbang, peningkatan layanan hubungan media dapat menguatkan fungsi humas dalam menjalin kerja sama dengan media dan insan pers, kemudian penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dengan cara pelatihan media, kerja sama dan penguatan media center sebagai media HAP dengan insan media sehingga anggota-anggota nanti memiliki kemampuan *public speaking* yang baik bila perlu ada pelatihan-pelatihan dengan tokoh-tokoh tertentu yang dikenal. Membantu kemitraan dengan berbagai pihak melalui peningkatan partisipasi,

#### **KETUA RAPAT:**

Kami ingatkan waktu tinggal 5 menit.

#### **CALON KAPOLRI (Komjen Pol. Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.):**

Siap.

Transformasi Pengawasan dilakukan dalam rangka penguatan fungsi pengawasan kita bagi menjadi 3 yaitu:

1. Program Pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan melalui penguatan peran Pimpinan dengan melakukan pengawasan langsung dan membangun pengawasan berbasis teknologi informasi dan memberikan *punishment* secara tegas termasuk didalamnya mendorong kepatuhan pengisian LHKPN.
2. Program Penguatan Fungsi Pengawasan dilakukan melalui sistem pengawasan internal dengan cara membentuk sistem pengawasan terpadu dan optimalisasi mekanisme pengawasan. Pengawasan oleh fungsi pengawas baik internal maupun eksternal ditekankan pada upaya pencegahan dan memberikan solusi bagi akar masalah terjadinya penyimpangan.
3. Program Pembentukan Sistem Pengawasan oleh Masyarakat melalui pembentukan sistem pengawasan oleh masyarakat yang cepat dan

mudah dengan cara menyediakan sistem pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan secara mudah.

Terkait dengan 16 (enam belas) program prioritas ini kami akan implementasikan secara bertahap melalui *timeline* penentuan rencana aksi target dan evaluasi yang dibagi dalam tiga tahap yaitu:

1. Tahap pertama dilaksanakan dalam waktu 100 hari sejak saya dilantik sebagai Kapolri.
2. Tahap kedua dilaksanakan mulai tahun 2021 hingga tahun 2022.
3. Tahap ketiga dilaksanakan mulai tahun 2023 sampai 2024.

Adapun *roadmap* Program Transformasi Polri berikut penjabarannya secara lengkap tertuang dalam naskah *fit and proper* untuk mengukur tingkat keberhasilan program prioritas. Saya menetapkan 174 (seratus tujuh puluh empat) aksi yang disesuaikan dengan struktur anggaran Polri renstra Polri yang berakhir pada tahun 2024 sehingga dapat terlaksana secara akuntabel dan keberhasilannya dapat dinilai pada masa-masa akhir jabatan. Jika 16 (enam belas) program prioritas ini dapat berjalan dengan baik maka harapannya dapat diperoleh *output* yang baik yaitu Polri yang Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan atau PRESISI dan *outcome*-nya adalah berupa Polri yang menjadi elemen penting bangsa untuk menjaga berdiri tegaknya demokrasi menuju Indonesia Maju.

Anggota Dewan dan hadirin yang saya muliakan

Pada forum yang terhormat ini izinkan saya menyampaikan 8 (delapan) komitmen apabila saya diberikan amanah menjadi Kapolri sebagai berikut:

1. Menjadikan Polri sebagai institusi yang Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan atau PRESISI.
2. Menjamin keamanan untuk mendukung program pembangunan nasional.
3. Menjaga soliditas internal.
4. Meningkatkan sinergitas dan soliditas TNI Polri serta kerbekerjasama dengan APH dan kementerian lembaga lain untuk mendukung dan mengawal program Pemerintah.
5. Mendukung terciptanya ekosistem inovasi dan kreativitas yang mendorong kemajuan ekonomi Indonesia.
6. Menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan.
7. Mengedepankan pencegahan permasalahan pelaksanaan keadilan, *restorative justice* dan *problem solving*.
8. Setia kepada NKRI dan senantiasa merawat kebhinekaan.

Demikianlah gagasan dan pemikiran yang saya sampaikan semoga dapat memberikan gambaran dan masukan bagi seluruh Anggota Dewan yang terhormat, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita dalam melanjutkan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*  
*Shalom Om Shanti Shanti Om*  
*Namo Buddhaya*

## **KETUA RAPAT:**

Hadirin yang saya hormati

Kita telah mendengar paparan yang cukup komprehensif dari Saudara calon Kapolri kini waktunya untuk kita melakukan masukan, pendalaman dan pertanyaan. Sebelum saya memulai perlu saya ingatkan kepada semua Bapak Ibu Anggota Komisi III bahwa acara ini adalah acara *Fit and Proper Test* bukan Rapat Dengar Pendapat Umum. Oleh sebab itu, tentunya hal-hal yang lebih teknis mendetail itu akan kita bicarakan jika Beliau terpilih menjadi calon Kapolri kita akan bahas dalam RDPU ke depan, untuk acara hari ini *Fit and Proper Test* tertentu yang kita bicarakan. Bapak Ibu sekalian mewakili aspirasi dari Dapil masing-masing misalnya, aspirasi masyarakat konstituennya silakan menyampaikan harapan-harapan kepada calon Kapolri.

Hal yang kedua, saya akan berikan waktu maksimal 5 menit kenapa saya akan batasi lamanya jalan rapat ini karena sesuai dengan protokol kesehatan yang diizinkan oleh Pimpinan DPR rapat ini maksimum dua setengah jam dengan toleransi 30 menit sampai 3 jam sehingga dalam hal bertanya dan menjawab kita batasi supaya jam satu siang ini rapat ini bisa kita akhiri. Kemudian calon menjawab tiap pertanyaan atau masukan 3 Fraksi kalau bisa jawabannya tidak lebih dari 10 menit. Demikian saya sampaikan untuk itu saya akan memulai memberikan kesempatan kepada Fraksi paling bawah saya akan selang-seling. Saya persilakan Fraksi PPP Saudara Asrul Sani silakan.

## **F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H, M.Si.):**

Tenang-tenang. Terima kasih Pimpinan rapat.

Pimpinan dan para Anggota Komisi III yang terhormat  
Yang terhormat Saudara calon Kapolri Pak Komisaris Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo

Pertama-tama tentu atas nama Fraksi PPP saya dikawal oleh Ketua Fraksi saya Pak itu kami ingin menyampaikan ucapan selamat atas kepercayaan dari Pak Presiden kepada Pak Sigit untuk menjadi Kapolri yang akan datang. Tadi saya sudah mendengarkan paparan Bapak yang begitu komprehensif bukan saja transformatif menurut saya tapi apa yang Pak Sigit sampaikan itu seolah-olah ingin merevolusi Polri secara keseluruhan. Nah tentu 5 menit tidak cukup untuk menyampaikan banyak hal, saya hanya ingin memberikan catatan-catatan saja Pak Sigit.

Yang pertama dari apa yang Bapak sampaikan terkait dengan *predictive policing*, Polisi yang prediktif ya tentu ini secara umum bagi kami yang kami pahami akan menjadi strategi untuk bukan saja dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas tetapi juga dalam rangka mencegah kejahatan melalui analisa data terhadap kejahatan yang pernah terjadi dan juga *profiling* masyarakat. Nah, kami melihat bahwa keberhasilan polisi prediktif ini *predictive policing* ini akan sangat tergantung pada adanya *Big Data*

*Analytics*. Tadi Pak Sigit juga sudah menyinggung tentang pembangunan pusat data informasi, nah tetapi ini juga akan memerlukan juga selain dukungan anggaran juga kerja sama dengan yang lain, ini catatan yang pertama.

*Predictive policing* ini selain akan banyak manfaatnya untuk apa mencegah kejahatan ke depan saya melihat juga punya potensi untuk terjadinya pelanggaran HAM karena akan banyak masuk juga ke dalam pendataan warga masyarakat. Nah yang berikutnya lagi *predictive policing* juga membutuhkan juga perubahan kultur Polisi ya dari apa Polisi yang terbiasa menjadi penindak menjadi Polisi yang terbiasa menjadi pelayan nah ini yang saya kira merupakan catatan-catatan kami Pak Sigit.

Secara umum yang ingin kami sampaikan sebagai aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Fraksi PPP adalah terkait dengan penegakan hukum, tadi Pak Sigit juga sudah menyampaikan bahwa berkomitmen ini tentu kami apresiasi bahwa wajah penegakan hukum kita ke depan bukan penegakan hukum yang tajam kebawah dan tumpul ke atas serta limitatif yaitu ketika sebetulnya secara apa hukum pidana bisa menjangkau banyak pihak tetapi dibatasi sampai pihak-pihak tertentu saja, nah ini yang menjadi harapan kami, kami ingin barangkali pendalaman Pak lebih konkretnya bagaimana dalam konteks perubahan kultur di Kepolisian ini ya Pak Sigit akan merubah wajah ya penegakan hukum kita dari yang berat pada sisi kepastian hukum yang kemudian akan diseimbangkan juga dengan sisi keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Saya kira itu pertanyaannya Pak Sigit karena semuanya sudah Bapak terangkan dari apa yang tadinya mau saya pertanyakan.

Terima kasih Pak Ketua.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thoriq*

Selamat pagi  
Salam sejahtera untuk kita semua  
*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT (HERMAN HERRY):**

Terima kasih, tepat 5 menit. Yang berikut kami berikan kesempatan kepada Fraksi PDI Perjuangan, Pak Inspektur Jenderal Purnawirawan Safaruddin.

**F-PDIP (H. SAFARUDDIN):**

Walah-walah.

*Bismillahirrahmanirahim*  
*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Selamat pagi  
Salam sejahtera bagi kita sekalian

*Shalom*  
*Om Swastiastu*

Yang terhormat Pimpinan Komisi III beserta seluruh Anggota Komisi III  
Yang kami hormati calon Kapolri Pak Komjen Pol. Sigit beserta seluruh staf-staf yang hadir

Saya ucapan selamat juga ini sudah kepercayaan dari Presiden diajukan Pak Sigit jadi calon Kapolri. Nah, kalau pertama-tama saya memberikan apresiasi kepada Pak Sigit ini kalau saya lihat bahan *Fit Proper Test*-nya ini luar biasa jadi memberikan gambaran kepada calon Kapolri yang era digital millennial. Jadi Bapak calon Kapolri millennial ya, yang kita sudah memasuki era millennial sekarang ini jadi kalau bahasanya keren, keren Bapak calon Kapolri yang keren sekarang. Pertama keren Pak kan begitu anak millennial, millennial Pak, calon Kapolrinya Pak. Pertama saya ingin tanyakan masalah kelembagaan ini Pak, ini kan masalah transformasi organisasi Bapak pada era tadi disampaikan Era Polisi 4.0 jadi ada Polisi yang mengantisipasi industri itu kemudian bagaimana sih sebetulnya sistem yang akan Bapak kembangkan didalam mengantisipasi industri yang millennial ini? Bagaimana perkembangan situasi kan digambarkan disini, gimana sih sehingga bisa kita dilaksanakan anggota di lapangan? Bagaimana pengawasannya, terus bagaimana sarana prasarana yang Bapak akan kembangkan nanti untuk kita memasuki pada era digital ini. Kemudian juga di dalam bagaimana Bapak *me-recruitment* personil Polri, bagaimana membinanya, dan bagaimana penggunaannya nanti untuk menghadapi era digital ini.

Yang kedua, masalah pembinaan struktur kultur Polri yang belum selesai sampai saat ini kalau Bapak sampaikan tadi bahwa Renstra Polri yaitu kita sekarang ini memasuki tahap keempat 2021-2025 yaitu organisasi yang unggul tetapkan *trust building* ini para tahap pertama juga belum selesai Pak *trust building*-nya ini kepercayaan masyarakat, Bapak gambarkan berapa tadi hasil surveinya itu. Nah ini yang saya mau tanyakan Bapak mau *start* dari mana apakah ada evaluasi yang jelas kultur kita ini sekarang berada dimana, kultur Polri ini sehingga Bapak *start* ini tahun 2021 itu jelas apa yang Bapak diperbaiki di situ mohon penjelasan Pak.

Yang ketiga ini masalah restorasi *justice*, bagaimana kriterianya hukum-hukum tindak-tindak pidana apa yang menjadi kriteria bisa di di restorasi *justice* ini jangan penafsiran masing-masing berdasarkan kalau teman saya baik sudah restorasi *justice*, ini mohon penjelasan lebih rinci sehingga bisa kita pedomani untuk ke depan jadi sama semua apa kriterianya.

Kemudian yang berikutnya masalah deteksi aksi berbasis data info ini pemetaan-pemetaan Kamtibmas ada pada halaman 89 itu Pak. Yang saya perlu ingatkan kepada Pak calon Kapolri ini kejahatan-kejahatan yang konvensional ini juga jangan dilupakan Pak karena itu hal yang meresahkan masyarakat. Jangan kita mau mengantisipasi yang digital sekarang ini siber

tapi kan kejahatan konvensional juga perlu kita perhatikan gitu Pak. Yang berikutnya adalah masalah pembinaan karir Polri. Sekarang Jenderal-Jenderal numpuk Pak ini bagaimana solusi bapak untuk jangan lagi ada anjak, sudah sekolah, sudah memenuhi syarat tapi jadi anjak, nggak ada kerjaan. Itu Pak bagaimana bapak mengatasi itu supaya nggak ada lagi penumpukan-penumpukan dalam pembinaan karir Polri. Saya kira *asessmen* kita mohon diberdayakan *asesment* gitu Pak.

Kemudian juga masalah anggaran, anggaran itu kalau saya lihat Pak ada yang ini anggaran 2021 kan sudah diketok sudah diundangkan. Per orang Bapak ada yang belum terakomodasi di 2021 disitu saya lihat ada hanya menggunakan data kontigensi, padahal data kontigensi itu hanya tiga yaitu konflik, teroris dan bencana alam. Nah saya minta ini betul-betul mohon penjelasan bapak bisa jalankan perorang ini presisi ini kalau di dukung anggaran, anggarannya dari mana yang belum terakomodir di 2021. Saya kira itu Pak yang terakhir, mohon terima kasih banyak Bapak sudah merangkul senior-senior. Bapak latih 1991 saya kira senior-senior masih banyak Pak dan saya yakin Bapak hebat merangkul itu termasuk staf-staf Bapak ini kan hebat sekali merangkul terutama di tempat karaoke itu. Tempat karaoke kan Bapak juga hebat merangkul orang kan. Dirangkulah senior-senior itu sehingga betul-betul solid. Saya kira itu Pak terima kasih banyak.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam*

Yang ketiga saya persilakan Fraksi Gerindra Pak Sarifuddin Sudding silakan.

**F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.):**

Ketua.

**KETUA RAPAT:**

*Sorry* maaf Fraksi PAN.

**F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.):**

Pimpinan ini kan *Fit And Proper* lebih bagus ketika dari beberapa pertanyaan kawan-kawan tadi itu langsung direspon oleh beliau gitu loh supaya bisa..

**KETUA RAPAT:**

Baik, kami sudah sepakati tadi sejak awal rapat setiap tiga pertanyaan atau masukan akan dijawab oleh saudara calon.

Silakan Pak Sudding.

**F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.):**

Baik terima kasih Pimpinan.

Bapak/Ibu Anggota Komisi III,  
Saudara calon Kapolri,  
Bapak Komjen Listyo Sigit Prabowo yang saya hormati,

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*  
Selamat siang.

Sangat menarik makalah ini Pak dibuat saya sampai dua kali membaca. Ini betul-betul ini kajian ilmiah sebenarnya ini, karena banyak filsafat yang terkandung di dalamnya, kajian ilmu ontologinya ada, aksiologinya jadi epistemologinya dan aksiologinya. Dengan *tag line* Polisi yang presisi transformasi Polisi menuju presisi, prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan. Kalau ini diwujudkan dari 16 program prioritas dan 7 komitmen yang disampaikan tadi maka ini akan terjadi perubahan yang sangat besar di Institusi ini. Saya kira memang di beberapa negara pemolisian yang modern selalu mengikuti pengembangan zaman. Tadi dijelaskan 4.0 era digital saya kira memang ini akan meninggalkan pola-pola penanganan secara konvensional. Tentunya ini harus dibarengi dengan kemampuan baik dari sisi Institusi maupun secara personal dalam kaitan masalah sumber daya manusianya. Ini harus betul-betul menjadi perhatian.

Pak Sigit yang saya hormati

Banyak persoalan dan tantangan yang akan dihadapi kedepan. Saya kira perubahan begitu cepat dan saya kira persoalan siber, lalu kemudian juga dalam konteks mewujudkan tugas pokok dan fungsi Kepolisian sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar sebagai rujukan dari amanat Konstitusi kita, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan berkeadilan sosial. Saya kira empat tujuan bernegara kita yang betul-betul harus terimplementasi dalam tugas pokok dan fungsi Kepolisian. Nah persoalan belakangan ini yang sering sekali kita lihat Pak, masih sering munculnya persoalan-persoalan masalah intoleransi, lalu kemudian persoalan-persoalan perbedaan pandangan dalam konteks masalah suku, etnis dan sebagainya. Saya kira ini adalah pengaruh global yang merasuk ke negara kita dan perdebatan ini sebenarnya sudah selesai pada saat negara ini didirikan.

Perdebatan tentang masalah persoalan agama, persoalan suku, persoalan etnis itu sudah selesai Pak pada saat negara ini didirikan oleh para pendiri bangsa. Sehingga kehadiran Institusi Kepolisian dan TNI itu berada dalam konteks untuk mengayomi, untuk melindungi seluruh anak bangsa tanpa ada perbedaan itulah konteks keragaman kita, itulah konteks kebinekaan kita tanpa memandang agama, tanpa memandang suku, tanpa memandang etnis dan saya mengapresiasi atas penunjukan bapak yang disebagai calon Kapolri. Mudah-mudahan dalam konteks ini bapak betul-betul

berada diatas semua golongan memberikan rasa keadilan kepada semua pihak sebagaimana amanat Konstitusi kita dalam konteks melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Nah untuk itu calon Kapolri tadi paparan yang disampaikan tadi sangat menarik namun ada beberapa hal juga saya ingin konfirmasi dalam kaitan pelaksanaan tugas kedepannya dalam Polisi yang prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan.

Beberapa sumber seperti baik dari kalangan LSM maupun dari beberapa media yang menyampaikan bahwa penggunaan kekerasan dan penahanan sewenang-wenang dan kriminalisasi menjadi isu mencolok sepanjang tahun 2020. Secara kualitatif memang tindakan represif Kepolisian cukup nampak adanya salah satunya ketika ada penentangan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Saya berharap bahwa Institusi Kepolisian seperti Pak Sigit sampaikan tadi bahwa adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bukan menjadi alat politik kekuasaan sehingga saya ingin mengkonfirmasi pada calon Kapolri dalam rangka untuk peningkatan profesionalisme dan juga pemberdayaan sumber daya manusia di Institusi Kepolisian dalam menghadapi dan mengatasi persoalan-persoalan yang muncul ditengah-tengah masyarakat seperti tentang kebebasan berekspresi, bagaimana langkah-langkah setrategis kedepannya yang dilakukan dalam konteks ini. Berikutnya juga tantangan kita adalah persoalan *cyber*

**KETUA RAPAT:**

Saya ingatkan waktu tinggal 30 detik.

**F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.):**

Kejahatan ini adalah kejahatan melalui internet. Dalam satu dekade terakhir ini menjadi ancaman dalam konteks stabilitas nasional, sehingga banyak ujaran kebencian antara satu dengan yang lain, muncul stigma tentang persoalan intoleransi dan sebagainya dan sebagainya ini adalah tantangan dan ancaman bagi kita. Nah untuk itu Pak Sigit bagaimana tentang ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia dan infrastruktur keamanan *cyber* Polri dalam menghadapi tantangan kejahatan *cyber* ini yang semakin canggih dan kompleks di masa-masa yang akan datang. Saya setuju bahwa Polisi yang prediktif yang mampu mengantisipasi, yang mampu melakukan pencegahan, yang mampu melakukan deteksi dini terhadap masalah-masalah sebelum terjadi itulah Polisi prediktif Polisi yang mampu memprediksi siapa pelakunya, korbannya, kejahatannya kapan, dimana akan terjadi ini yang akan ini yang saya tangkap dari makalah yang bapak sampaikan tadi. Mudah-mudahan dengan Polisi yang mampu memprediksi dengan data yang ada saya kira kejahatan dapat dicegah sebelum terjadi hal seperti itu, itu dalam kaitan menyangkut masalah kejahatan *cyber*. Berikutnya dalam kaitan persoalan narkoba saya mengapresiasi Pak Sigit pada saat sebagai..

**KETUA RAPAT:**

Pak Suding waktunya sudah habis kita akan masuk ke *closing*. Waktunya sudah habis sesuai kesepakatan kita.

**F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.):**

Baik saya atas nama Fraksi PAN menyampaikan selamat atas penunjukan saudara calon Kapolri dan mengikuti *Fit And Proper* di Komisi III dan mudah-mudahan ketika diberikan suatu amanah sebagai Pimpinan Polri terjadi perubahan di Institusi Kepolisian baik dalam konteks paradigma kultural maupun secara Institusional.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam*

Sesuai kesepakatan kita saudara calon Kapolri boleh menjawab tiga masukan dan pertanyaan tadi. Namun saya ingatkan waktunya cuma 10 menit. Oleh sebab itu saudara menjawabnya dalam konteks garis besarnya saja tidak perlu sampai rinci. Demikian kami persilakan.

**CALON KAPOLRI (Komjen Pol. Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.):**

Terima kasih Bapak Pimpinan Komisi III.

Terkait dengan beberapa pertanyaan yang kami catat tadi dan juga harapan terkait dengan Polisi kedepan. Ada beberapa catatan yang kami catat tadi mohon izin dari Pak Arsul Sani bagaimana menampilkan wajah penegakan hukum yang jangan hanya tajam kebawah tapi tumpul keatas dan bagaimana kemudian pola penerapan mana kala kita kemudian melakukan kegiatan yang bersifat *restorative justice* seperti apa, baik kami akan coba jawab. Memang ini adalah tantangan kami yang memang kami hadapi bagaimana tadi kami sampaikan tadi bahwa sebelum kami memulai untuk kemudian mengikuti kegiatan uji kelayakan pada hari ini kami mencoba berkeliling bertemu dengan seluruh tokoh masyarakat. Kami berusaha untuk mencoba, mendengar, berdialog dan kemudian kami ingin tahu sehingga itu menjadi penting, karena tidak mungkin kami berpikir bahwa pelayanan Polisi itu sudah seperti yang ada dibayangkan Polisi itu kami tidak mau sehingga kami harus benar-benar mendengar dari masyarakat apa si yang diinginkan tentang Polisi, apa *hoaks* nya apa masalahnya sehingga kemudian kami harus berangkat dari situ.

Terkait dengan masalah penegakan hukum Pak jadi kenapa ini saya sampaikan seperti contoh yang tadi saya sampaikan bahwa perlu ada penegakan hukum yang kemudian di dalam pelaksanaannya kita juga harus melakukan kegiatan-kegiatan yang arif yang kemudian bisa memenuhi rasa keadilan. Seperti tadi kami sampaikan bagaimana kasus Nenek Minah yang

hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dia mengambil kakao ditempat tetangganya, mungkin karena sudah berulang kali kemudian yang bersangkutan diproses dan harus masuk penjara.

Terkait dengan hal-hal seperti ini tentunya kedepan Polri tidak perlu memaksakan bahwa ini harus diproses tuntas dalam bentuk ya kasusnya P21 kirim Kejaksaan kemudian di vonis. Tentunya hal-hal seperti ini harus kita lihat dengan lebih arif dengan lebih bijaksana, karena ini terkait dengan masalah rasa keadilan. Jadi kalau memang kemudian kita bisa membuat pola, kita pertemukan, kemudian masing-masing pihak kemudian bisa menerima kenapa tidak kita selesaikan. Jangan sampai nanti ada ayam yang melintas di halaman tetangga hanya gara-gara seperti ini ribut mulut kemudian harus diproses, kemudian ini tentunya juga akan menimbulkan potensi-potensi konflik karena hal-hal yang seperti ini. Kenapa tidak kita kumpulkan kemudian apa masalahnya kita damaikan disitu kemudian itu menjadi tuntas. Saya kira itu akan memenuhi rasa keadilan, seperti juga mungkin terhadap hal-hal yang ini juga terjadi tapi memang harus kita awasi. Yang paling penting adalah di dalam kegiatan-kegiatan seperti ini maka Anggota jangan memanfaatkan ini untuk kemudian melakukan penyalahgunaan wewenang itu yang harus kami jaga. Oleh karena itu kami betul-betul mempersiapkan pengawasan tadi sudah kami sampaikan bahwa kami membuka ruang pengawasan dengan menggunakan teknologi informasi sehingga masyarakat bisa langsung mengakses.

Kemudian teknologi informasi ini dalam bentuk pengawasan ini kami akan konekkan baik di Irwasum di internal kami di Propam, nanti di Kompolnas bila perlu, kemudian Menko Polhukam dan bila perlu kami tempatkan di *desk* khusus yang ada di Presiden, sehingga kita semua betul-betul termonitor bahwa apa yang kami lakukan ini bisa kita kontrol yang kita lakukan ini betul-betul ada manfaatnya dengan masyarakat artinya ada ruang kebebasan tapi juga ruang kebebasan ini tentunya harus betul-betul diawasi.

Tentunya terkait dengan hal lain kami juga tidak menutup tapi semangatnya adalah itu kecuali terkait dengan kasus-kasus yang kemudian mengakibatkan kehilangan jiwa itu mau tidak mau itu harus kita proses. Kemudian terkait dengan dunia *cyber* kalau itu kemudian mengancam masalah bagaimana kalau ini tidak kita proses ini berdampak kita terhadap integrasi bangsa terhadap masalah SARA maka hal-hal seperti ini tetap harus diproses, artinya ada batasan-batasan dimana resto ini kita terapkan. Jadi ruang ini adalah bagian dari diskresi Kepolisian yang bisa dimanfaatkan oleh Anggota untuk mewujudkan rasa keadilan. Namun disisi lain ruang pengawasan juga kita siapkan sehingga apabila ada resiko-resiko penyalahgunaan wewenang bisa dilaporkan dan tentunya kita sudah menyiapkan nanti sistemnya untuk bisa kemudian segera ditanggapi sehingga kemudian ada langkah-langkah yang dilakukan secara internal.

Kemudian mohon izin terkait dengan pertanyaan kedua dari Bapak Safarudin terima kasih Pak, bapak dukung kami untuk menjadi Kapolri milineal Pak. Mohon izin Pak berkaitan dengan transformasi Kelembagaan untuk meningkatkan Polisi menjadi Polisi yang memiliki kemampuan 4.0 tentunya

memang kemudian kami harus merubah cara-cara merekrut yang tentunya tadi sempat disampaikan ada afirmatif, ada biasa dan ada juga pencarian bakat-bakat khusus talent-talent khusus. Jadi artinya terhadap masyarakat yang ingin masuk ke Polisi dia memiliki IQ kemampuan teknologi informasi yang tinggi tapi mungkin dibidang jasmaninya agak kurang dia pakai kaca mata dan kemudian larinya tidak terlalu kencang gitu kan tentunya nanti akan menjadi perhatian khusus dan bila perlu kita merekrut khusus untuk hal-hal seperti itu sehingga kemudian terkait dengan program kami ini betul-betul bisa diawaki dengan SDM yang handal SDM yang canggih SDM yang memang dibutuhkan di dalam perkembangan di masyarakat yang memang semakin hari tidak hanya 4.0 bahkan dimasyarakat sudah dikenal dengan 5.0 di Jepang sehingga hal-hal seperti ini mau tidak mau kita harus bisa menyesuaikan bisa mengikuti.

Kemudian terkait dengan kultur Polri Pak terkait dengan renstra memang betul Pak saat ini kita sudah masuk tahap *excellent* atau unggul. Namun tentunya semua yang kami uraikan tadi Pak bagaimana membentuk postur Polri yang presisi itu tidak lepas dari upaya kami untuk memberikan rasa *trust*, membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polis sehingga kemudian kita merubah interaksi-interaksi bagaimana kita kemudian memanfaatkan teknologi informasi itu tidak lepas dari upaya kita untuk menciptakan kultur baru budaya baru, budaya Polisi yang melayani. Kita mengurangi resiko interaksi yang kemudian disitu bisa mengakibatkan penyalahgunaan wewenang sehingga napas dari pada program *excellent* yang kami coba masukan dengan program presisi ini adalah sejalan Pak bagaimana membangun kepercayaan dengan memanfaatkan teknologi informasi merubah budaya pelayanan ini adalah bagian dari bagaimana supaya Polri bisa lebih dipercaya masyarakat. Karena penting sekali Pak kami berusaha untuk kemudian mencoba mengandai-andai bagaimana kalau Polisi kami kedepan dilapangan tanpa pistol begitu Pak, kemudian bisa bicara Anda berhenti bubar dan itu dilaksanakan itu cita-cita kami Pak. Jadi itu bisa terjadi Pak kalau kepercayaan publik terhadap Polri tinggi dan itu adalah impian kami dan mudah-mudahan bisa kami wujudkan Pak.

Kemudian terkait dengan kejahatan konvensional. Sistem IT digital teknologi yang tadi terkoneksi dengan *big data* ini bagian dari upaya kita untuk kemudian bisa lebih memberikan rasa aman kepada masyarakat khususnya terhadap ancaman-ancaman kejahatan-kejahatan konvensional yang biasa dikenal dengan *street crime*. Jadi dengan adanya teknologi informasi seperti ini Pak ini justru tentunya akan membantu kita untuk mengidentifikasi para pelaku pidana dan ini mudah-mudahan dengan cara ini tentunya akan bisa mempercepat sekaligus tentunya kita tetap memiliki peta jaringan. Namun dengan teknologi informasi ini pada saat pelaku tindak pidana melintas di suatu wilayah yang tertangkap oleh cctv misalkan yang terkoneksi dengan kita maka akan muncul identitasnya kemudian alamatnya dan sebagainya dan itu tentunya akan memudahkan kita untuk melakukan penangkapan. Jadi intinya Pak kejahatan konvensional dengan penggunaan teknologi yang ada kita kembangkan dengan sistem konektivitas yang ada ini kehadiran kita ditengah-tengah masyarakat akan semakin kelihatan sehingga kejahatan-kejahatan *street crime* ini betul-betul bisa kita hentikan atau bisa kita tekan.

Kemudian solusi Pak terkait dengan masalah anjak yang memang ini memang menjadi pertanyaan mana yang harus di dahulukan lebih baik membuat pintar dulu baru kemudian diberikan jabatan atau sebaliknya gitu kan. Ini memang selalu terjadi Pak tapi kedepan kami akan menyiapkan Pak rencana pengembangan termasuk tentunya SOTK Pak pengembangan organisasi hingga ruang-ruang jabatan akan menjadi lebih banyak Pak secara bertahap. Kemudian bagaimana pada saat mereka kemudian lulus dari sekolah mereka juga langsung bisa menempati posisi jabatan ini sudah mulai berjalan tapi memang ruang yang memungkinkan untuk itu adalah bagaimana kemudian kita membuka membangun SOTK baru memberikan ruang-ruang baru sehingga kemudian anggota-anggota kami bisa tertampung. Kemudian juga.

**KETUA RAPAT:**

Kami ingatkan waktu.

**CALON KAPOLRI (Komjen Pol. Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.):**

Siap.

Mohon izin Pak kurang lebih seperti itu. Kemudian dari Pak Sudding banyak catatan-catatan terkait dengan beliau harapan beliau.

Terus terkait dengan persoalan terkait dengan masalah intoleran, perbedaan pandangan terhadap etnis yang saat ini masih ada tentunya pelan-pelan Pak kita kikis, karena kita tahu bahwa negara kita ini adalah negara kesepakatan. Kesepakatan dari para *the founding father* bahwa negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia jadi ini adalah nilai yang terus harus kita pertahankan terhadap ancaman dari kelompok siapa pun itu yang kemudian untuk mencoba mengubah hal ini maka bagi kita itu harus kita berantas.

**KETUA RAPAT:**

Baik Pak cukup Pak penjelasannya, cukup karena masih antri yang lain.

**CALON KAPOLRI (Komjen Pol. Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.):**

Siap Pak, mohon maaf belum bisa menjawab secara lengkap Pak terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT:**

Kami masuk ke Fraksi berikut adalah Fraksi Partai Golkar, Saudara Supriansa kami persilakan.

**F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):**

Terima kasih Pak Ketua.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya perkenalkan saya Supriansa Pak Ketua didampingi oleh Ibu Sari yang bidadari pada hari ini, ada Pak Harum, ada Andi Rio dibelakang.

Yang saya hormati Pimpinan seluruh Ketua

Para Anggota Komisi III

Pak calon Kapolri bersama dengan seluruh jajaran Perwira Tinggi dan Menengah yang sempat mendampingi pada hari ini

Pertama-tama kami dari Fraksi Partai Golkar mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang sudah memilih satu diantara lima yang telah diajukan oleh Bapak Kopolnas menjadi calon Kapolri yang hari ini di Komisi III telah diadakan uji kelayakan atas petunjuk dari Pimpinan DPR RI. Saya mencoba memanfaatkan waktu dengan baik kalau gitu bahwa apresiasi pula kami dari Fraksi Partai Golkar setelah ditunjuk Bapak Listyo Sigit Prabowo menjadi calon tunggal untuk mengikuti uji kelayakan pada hari ini, karena tidak lama setelah Bapak menjabat sebagai Kabareskrim pada saat itu Bapak telah mencatatkan dalam sejarah tinta emas buronan yang begitu lama bolak-balik masuk Indonesia ternyata di tangan Bapak atas komunikasi antar lembaga, komunikasi antar keamanan, antar negara bapak telah lakukan sehingga mampu membawa buronan yang puluhan tahun keluar masuk di Indonesia kembali ke Indonesia untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Namun disini lain Pak Sigit, keberhasilan itu sedikit tidak sempurna diakibatkan karena adanya oknum Perwira di Kepolisian itu sendiri yang diduga keras ikut membantu buronan yang keluar masuk di Republik ini.

Ujung-ujungnya adalah yang kita khawatirkan adalah peristiwa ini tentu ada kolusi dan mudah-mudahan tidak menjadikan sebuah korupsi diujungnya. Olehnya itu kami dari Fraksi Golkar ingin menanyakan bahwa bagaimana penjelasan saudara calon Kapolri terkait hal ini dan apa langkah-langkah yang saudara calon Kapolri bisa lakukan dalam rangka meminimalkan terjadinya tindakan kejahatan korupsi yang sangat merugikan bangsa ini tentu berdampak kepada rakyat, ini yang pertama Pak calon Kapolri.

Yang kedua adalah memasuki di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah dijelaskan tugas pokok dari pada Kepolisian itu sendiri. Sebagaimana yang telah diurai di dalam makalah disini saya sedang membaca pada halaman 23 tentang pelayanan publik yang bapak telah terangkan disini sangat sempurna sekali. Saya setuju kawan-kawan yang lain bahwa ini adalah makalah yang dibuat oleh kawan-kawan yang diprakasai oleh Bapak Sigit ini adalah makalah terbaik sepanjang zaman ini. Sempurna menurut kajian kami, tidak bisa kita pungkiri hasil-hasilnya sangat sistematis dan membawa kita untuk berpikir bagaimana Polisi kedepan untuk memperbaiki kepentingan-kepentingan yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Saya berbicara tentang pelayanan publik. Sejumlah pelayanan dalam PP Nomor 76 Tahun 2020 Pak tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak, tentu menurut data yang ada pada kami kurang lebih 31 jenis PNPB yang ada di wilayah Kepolisian Republik Indonesia. Olehnya itu memasuki di era yang tadi disebutkan ini adalah era 4.0 yang disebutnya bahwa milenial oleh Pak Safaruddin tadi. Maka bagaimana kira-kira Saudara bisa mentransformasikan sebagaimana yang ada dalam buku ini berbicara tentang transformasi. Bagaimana Saudara bisa mentransformasikan berbagai pelayanan yang ada pada Polri agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ini terakhir dari dapil, Pak Ketua izinkan kami ini terakhir dari dapil. Bahwa Kabupaten Soppeng adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, dimana kotanya banyak masuk dalam kawasan hutan.

Baru-baru telah diproses ditangkap oleh Kepolisian orang yang menanam cabai dipinggir rumahnya itu juga diproses hukum. Kemudian yang sekarang ini menjalani kursi persakitan ada tiga petani lagi-lagi diperhadapkan dengan hukum. Saya sangat setuju Bapak calon Kapolri bahwa persoalan-persoalan yang mestinya masih bisa kita negosiasikan masih bisa kita bicarakan dengan menempatkan haknya masyarakat apalagi masyarakat kecil masih bisa kita bicarakan untuk mentoleransi masyarakat kita saya setuju itu. Olehnya itu saya mewakili dari Fraksi Partai Golkar memohon kepada bapak untuk menyampaikan kepada seluruh lapisan yang ada di daerah sampai sektor Polsek itu untuk berbuat sebagaimana yang telah dijelaskan pada makalah yang bapak

**KETUA RAPAT:**

Waktunya sudah habis masuk ke *closing* Pak Supriansa.

**F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):**

*Closing statement* bahwa susunan dari pada apa yang kami tanyakan pada hari ini adalah menurut sesuai dengan petunjuk yang ada dari Ketua Fraksi bersama dengan Sekretariat Fraksi dan dipandu langsung oleh Bapak Dr. Adies Kadir.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

Yang berikut Fraksi Partai Keadilan Sejahtera silakan siapa juru bicaranya

**F-PKS (DR. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H.):**

Sebelah sini Ketua. Ketua sebelah sini lihat dulu Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Oh Pak Dimiyati Natakusumah silakan.

**F-PKS (DR. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H.):**

Terima kasih Ketua.

Yang saya hormati beserta Pimpinan Komisi III dan Anggota Komisi III yang saya hormati  
Pak Komjen Polisi Drs. Sulistyو Sigit Prabowo  
Beserta ada Pak Wakapolri dan jajarannya

Saya senang Pak tim Bapak ini ada Polwan berjilbab dua ini. Ini tanda-tanda Bapak cerdas ini. Ini kami sudah terpesona.

Hadirin/Hadirat yang berbahagia

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Alhamdulillah Wa syukurillah Wa Ni'matillah  
Wala Haulla Walla quwwata illa billah.*

Syukur *alhamdulillah* hari ini kita bisa melakukan *Fit and Proper* dan juga mengapresiasi kepada Bapak Presiden yang telah menunjuk Komjen. Sigit sebagai calon tunggal Kapolri. Ini Komjen yang termuda yang dipilih ini luar biasa dan Polri solid *Alhamdulillah*. Pak Sigit ini Polisi yang cerdas dan juga bertangan dingin dengan beliau ini semua beres. *Track record* beliau pernah menjadi Pimpinan Polsek tingkat Kecamatan, Pimpinan Polres tingkat Kabupaten Kota dan juga pernah jadi Kapolda Banten saya warganya bapak Pak. Jadi saya tahu sepak terjang bapak Banten kondusif luar biasa. Saya ini kalau ngomong salah aja dimarahi Ulama disana saya orang Banten dan beliau pernah Kadipropam juga jadi tahu betul Polisi yang buruk, Polisi yang nakal, Polisi yang jelek, nah sekarang terusin sambo itu pada, Irjen termuda disitu ya luar biasa dan juga pernah jadi Kabareskrim. Kabareskrimnya ini tahu siapa-siapa penjahat pelaku *cyber crime* dan *criminal justice*. Nah, saya kebetulan ini ditugaskan oleh Setjen saya ini Kapoksi saya hadir itu disana monitor terus itu Habib Abu itu dan juga Ketua Fraksi Pak Jazuli Juwaini dan ini ada tugas dari Pak NJ ini Nasir Djamil untuk menanyakan beberapa hal.

Terkait dengan promoter yang berganti presisi ini luar biasa Pak saya kasih nilai 9 Pak, makalahnya sangat bagus dan saya senang membacanya. Maka oleh sebab itu saya ingin menanyakan beberapa hal pertama terkait dengan transformasi organisasi isunya adalah terkait reformasi Polri. Memimpin Polri berarti memagang Komando lebih dari 470.000 personil dengan anggaran 105 triliun. Polisi ini bukan manusia biasa, ini Polisi yang dipersenjatai dan bisa melakukan hal-hal lain. Tentunya membutuhkan visi yang jauh kedepan. Salah satu yang menjadi pekerjaan rumah adalah visi tentang reformasi Kepolisian. Dalam hal reformasi Kepolisian ini ada isu soliditas internal, ini sudah ramai Pak yang banyak disebutkan berbagai pihak. Sepertinya isu ini juga disampaikan salah satu senior di Kepolisian.

Salah satu penyidik yang dikenal publik mengungkapkan bahwa banyak faksi di Polri yang syarat kepentingan dan saling menyandera. Sehingga Pimpinan Polri tidak berani mereformasi Polri menjadi institusi yang dipercaya. Hal ini juga sejalan dengan analisis yang disampaikan oleh salah seorang peneliti lokataru, menyatakan bahwa Polri rawan terseret gejolak politik elit. Artinya ada dua hal yang saling terkait yaitu independensi dan soliditas. Sepanjang institusi bekerja tegak lurus menjalankan tugas secara independen maka soliditas korup akan bisa terjaga dengan baik. Sebaliknya jika ada oknum yang nakal maka masing-masing personil akan bekerja untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Saya tahu Pak Sigit ini faksinya Pak Jokowi jadi betul-betul sejalan dengan visi misi Presiden jadi netral betul untuk bangsa dan negara.

Bagaimana pendapat Jenderal mengenai upaya reformasi di Polri yang selama ini terjadi, apakah sudah sesuai harapan, sejauh manakah reformasi yang telah dilakukan dan kearah manakah reformasi tersebut akan dilanjutkan oleh Jenderal. Adakah strategi khusus dalam kepemimpinan jenderal untuk menuntaskan reformasi Polri tersebut. Kami ingin tahu bagaimana visi misi Kapolri terpilih kedepan tentang reformasi Polri ini. Yang kedua, operasional transformasi, transformasi operasional yang disampaikan oleh Jenderal tadi yaitu terkait isu profesionalisme dan humanisme dalam menjalankan tugas. Kalau saya lihat Pak Sigit pasti senanglah orang karena ini Polisi sudah akrab dan humanis begitu, tidak seram begitu seperti Polisi-polisi lainnya seram kalau di negara lain itu.

Tahun kemarin kontras menyatakan Polri diduga terlibat dalam 921 kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia sepanjang Juli 2019 sampai Juni 2020. Dari peristiwa itu 1.627 orang luka-luka dan 304 orang tewas. Kejadian lain yang menjadi perhatian publik adanya *extra judicial killing* di kilometer 50 pada bulan Desember 2020 sebulan yang lalu. Terus terang kami sebagai salah satu Anggota Komisi III yang menjadi mitra Polri selama ini banyak sekali dimintai penjelasan oleh masyarakat soal isu-isu demikian, misalkan kenapa penanganan demo kok represif, kenapa pelanggaran prokres sampai dibuntuti, kenapa pelanggaran prokres sampai membuat enam nyawa melayang. Kami sendiri pun selama ini mengalami kesulitan untuk memberikan berbagai penjelasan kepada masyarakat. Saya kira kedepan pendekatan yang professional dan humanis oleh Polri perlu lebih dikedepankan sehingga Polri melindungi dan mengayomi akan semakin dirasakan masyarakat.

Oleh sebab itu sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Konstitusi kita negara kita adalah negara hukum *rule of law rechtsstaat*. Dalam *rule of law* prinsip-prinsip yang harus digunakan adalah *supreme of law, equality before the law, due process of law*. Oleh sebab itu mohon penjelasan dari Jenderal adakah desain yang akan Jenderal laksanakan untuk membuat pendekatan yang lebih professional dan humanis. Adakah pola khusus yang akan diterapkan agar tidak lagi terjadi pendekatan yang represif. Tolong dijelaskan kepada kami bagaimana desain ini kedepan.

**KETUA RAPAT:**

Baik cukup waktunya habis Pak Dimyati.

**F-PKS (DR. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H.):**

*Closing.*

**KETUA RAPAT:**

Masih ada *closing*.

**F-PKS (DR. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H.):**

*Closing ya.*

*Closingnya* di dapil saya Pak. Pak Listyo Sigit sudah tahu tolong lebih dikembangkan lagi Pak. Terima kasih Pak.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

Baik yang berikut Fraksi Gerindra silakan

**F-P.GERINDRA (WIHADI WIYANTO, S.H., M.H.):**

Terima kasih Pimpinan.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi III dan juga Pak Komjen Sigit Listyo Perabowo

Pertama-tama saya mengucapkan selamat Pak atas pencalonan bapak sebagai Kapolri yang baru dan ini adalah merupakan suatu terobosan. Kalau periode yang lalu Pak Tito mungkin usianya lebih dari pada lebih tua dari pada saat ini Bapak dicalonkan jadi mungkin lebih panjang masa pensiunnya. Saya melihat apa yang menjadi presentasi bapak tadi itu adalah merupakan suatu makalah yang boleh dikatakan kalau tadi rekan saya Pak Supriansa sempurna nah biasanya kalau Golkar sudah ngomong sempurna biasanya nanti pemilihan bapak juga sempurna ini sepertinya. Jadi dari paparan tadi Pak ada beberapa hal yang memang ada sedikit perubahan kedepan yang kita harapkan dari pada Polisi. Polisi yang lalu mengatakan bahwa dengan semboyan promoter dan sekarang Bapak merubah dengan persisi. Ini saya harapkan ada suatu perubahan juga.

Jadi kalau pada saat dulu Pak itu adanya suatu mekanisme *punish and reward* yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tentu saya lihat tadi bapak masih juga menerapkan adalah *punish and reward* terhadap setiap Anggota, maka *punish and reward* ini saat ini *rewardnya* ini lebih banyak kepada mereka-mereka yang menangani permasalahan-permasalahan seperti narkoba, teroris dan juga kejahatan-kejahatan konvensional. Nah pada saat ini bapak

juga sudah melihat bahwa Polisi kedepan adalah 4.0, artinya Polisi-Polisi yang menangani kejahatan konvensional dan juga Polisi-Polisi yang dibelakang yang menangani permasalahan administrasi, pembinaan dan kemudian cyber ini yang tidak terlihat. Nah, pada saat ini juga banyak juga Polisi-polisi yang seperti itu sekarang dalam mengalami masalah *reward* mereka kesulitan, artinya mereka banyak yang mengeluh karena banyak yang mereka ini untuk melakukan jenjang sekolah saja mereka kesulitan. Jadi sebagai contoh itu ada Kapidkum salah satu Polda di Jawa mereka sudah bisa memenangkan perkara-perkara. Nah, ini perkara-perkara pengadilan ini juga pra peradilan ini juga bagian dari pada apa yang kedepannya bahwa masyarakat juga akan mengkritisi Polisi. Nah, ini juga menjadi garda kedepan dari pada Polisi bagaimana untuk melakukan penanganan-penanganan masalah gugatan-gugatan itu nah ini pun kesulitan mereka.

Jadi kalau sekarang Bapak mengganti presisi ini suatu hal yang ada satu plesetan dari promotor Pak promotor itu katanya promosi orang-orang tertentu gitu. Jadi sekarang Bapak ganti dengan presisi ini trauma itu dari masalah trauma itu dari Anggota itu hilang seperti itu Pak, sekarang tidak lagi promotor gitu tidak tentunya itu kita harapkan persisi. Nah kalau persisi ini kan sesuai dengan apa yang. Jadi hal-hal seperti inilah Pak yang saya harapkan kedepannya apa yang mesti Bapak lakukan dalam situasi masa yang masih panjang. Tadi Bapak katakan bahwa ada tahap satu, tahap dua, tahap tiga saya harapkan hal-hal seperti ini dalam pembinaan SDM itu dapat terselesaikan semua.

Pak Listyo bahwa saat ini Bapak dicalonkan sebagai Kapolri ini adalah suatu hal yang mungkin situasinya juga berbeda dengan yang lalu, karena masalah banyaknya masalah pandemi. Kita melihat bahwa secara ekonomi *out look* ekonomi kita saat ini sedang tidak bagus dan tahun 2021 itu pemerintah mencanangkan bahwa *out look* ekonominya adalah melakukan pemulihan ekonomi. Nah dalam melakukan pemulihan ekonomi ini Pak Polri dan TNI dilibatkan. Artinya apa? Artinya disini bahwa Kepolisian harus menjaga Kamtibmas untuk pemulihan ekonomi ini. Nah kita lihat contoh-contoh yang sekali ini banyak Pak. Banyak masyarakat dengan prokes, kemudian ada Polisi, ada TNI, ada Satpol itu banyak juga yang mereka protes terhadap masalah prokes ini. Terhadap permasalahan pemulihan ekonomi ini

#### **KETUA RAPAT:**

Saya Ingatkan waktunya.

#### **F-P.GERINDRA (WIHADI WIYANTO, S.H., M.H):**

Langkah kedepan apa yang bapak bisa lakukan di dalam menangani ini untuk menjaga stabilitas ekonomi ini dengan tetap menjaga prokes. Saya kira itu dua hal yang saya perdalam dari pada apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Komjen Listyo Sigit.

Terima Pak Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih sudah tiga Fraksi bertanya. Giliran saudara calon untuk menjawab. Saya ingatkan waktu cuma 10 menit. Banyak yang saya dengar tadi adalah masukan harapan silakan ditampung saja. Saudara menjawab apa yang ditanyakan secara garis besar. Demikian.

Silakan.

**CALON KAPOLRI (Komjen Pol. Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.):**

Terima kasih Bapak Pimpinan Komisi III.

Kami langsung jawab ada beberapa catatan tadi terkait dengan masalah kasus penanganan kasus Joko Tjandra dari Pak Supriansa. Mohon izin Pak sebagaimana kami sampaikan bahwa tentunya kami akan memperbaiki budaya Polri sehingga tentunya hal-hal yang seperti tadi kami sampaikan bagaimana agar kemudian interaksi-interaksi itu bisa kita hindari itu juga tidak lepas agar kita bisa menghindari potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu tentunya ini yang tentunya kemudian ditanamkan, ditanamkan di dalam setiap insan Polri yang melaksanakan tugas. Jadi terhadap potensi pelanggaran yang kemudian bisa membuat kita menjadi terjerumus tentunya bagaimana itu dihindari. Oleh karena itu sistem pengawasan yang kuat yang tadi saya sampaikan itu, itu bagian dari upaya untuk menyelamatkan Anggota supaya Anggota itu kemudian tidak terperosok atau pun tidak jatuh. Oleh karena itu mohon izin Pak komitmen kami jelas terkait dengan masalah penanganan korupsi Anggota kami kalau memang ada yang terproses bisa kita buktikan ya kami harus proses tuntas karena itu bagian dari komitmen untuk menjaga marwah Polri itu sikap kami.

Kemudian yang kedua terkait dengan masalah dari Pak Supriansa tadi bagaimana bisa mentransfer agar berbagai pelayanan betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Tadi Pak kami sampaikan bahwa kedepan khususnya pelayanan yang terkait dengan hal-hal yang memang kita kelola selama ini seperti STNK, SIM, SKCK dan juga pelayanan terhadap surat hilang tadi sudah kami sampaikan bahwa kami akan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sehingga masyarakat tidak perlu harus datang ke kantor Polisi, cukup masuk ke aplikasi tertentu yang nanti disiapkan sehingga kemudian di aplikasi tersebut kemudian masyarakat bisa langsung mendapatkan pelayanan seperti perpanjangan SIM, perpanjangan STNK dan sebagainya dan bila perlu nanti persiapan *delivery system* bagaimana kemudian produknya itu bisa dikirim ke masyarakat. Tentunya dengan bekerja sama dengan Kementerian Lembaga yang lain, BUMN yang ada seperti PT. POS dan sebagainya sehingga itu bisa dimasukkan sebagai tarif resmi masuk negara seperti itu. Tapi intinya bagaimana kemudian kita membuat pelayanan ini menjadi lebih baik lebih mudah dan masyarakat tidak perlu repot-repot harus datang ke kantor Polisi.

Kemudian terkait dengan masalah pelanggaran kawasan tadi yang di wilayah hutan yang terjadi di Sopeng Pak nanti akan kami turunkan tim untuk ngecek. Prinsipnya kami tadi sudah sampaikan terkait dengan Polsek sebagai

Lembaga resolusi yang bisa melakukan *restorative* saya kira terhadap masalah-masalah yang kira-kira masih bisa diedukasi tentunya akan kita berikan kesempatan. Cuma yang selalu saya pesankan jangan sampai ada pelanggaran di hutan lindung, karena hutan ini kalau nggak kita yang jaga siapa lagi jadi saya ingatkan lagi terkait pelanggaran di hutan lindung pasti saya proses tuntas. Karena ini adalah terkait dengan masa depan tanah air kita masa depan alam kita kalau nggak kita jaga siapa lagi jadi itu sikap kami.

Kemudian dari Pak Dimiyati terkait dengan masalah bagaimana menjaga soliditas internal terkait dengan adanya isu-isu. Kemudian menjaga agar kedepan Polri bisa menjadi humanis. Kemudian bagaimana ada catatan tadi terkait dengan masalah kejadian kilometer 50 dan ini juga dihadapkan dengan penanganan terkait dengan masalah protokol kesehatan. Jadi untuk soliditas internal Pak tentunya kami akan terus jaga khususnya ini yang biasa terjadi adalah manakala terkait dengan masalah posisi-posisi jabatan. Tentunya hal-hal ini akan kita atur secara proporsional, jadi senior juga tetap memiliki ruang, junior yang berprestasi juga kita berikan kesempatan. Jadi tentunya semuanya kita uji dan kita lihat dari kompetensi itu menjadi faktor utama. Jadi namun proporsional itu akan kita lakukan dengan demikian kita harapkan kita tidak sibuk lagi dengan memikirkan hal-hal seperti itu karena sudah ada parameternya, kemudian ada penilaiannya, ada standarnya, ada *assessmentnya* sehingga nanti akan diatur disitu. Tentunya terhadap prestasi-prestasi di wilayah yang mereka dinas dibidang pembinaan sementara yang lain di operasional semuanya sudah ada parameternya sudah ada poinnya sehingga proporsional antara Anggota yang akan mendapatkan kesempatan untuk sekolah dioperasional dan dibidang pembinaan akan kita atur.

Jadi itu semua juga untuk supaya mengakomodir bahwa Anggota cukup berpikir bagaimana dia berkerja yang baik. Jangan berpikir sekali-kali apalagi saya sering saya sampaikan tidak ada lagi Anggota pusing-pusing mikirin apa yang harus saya kasih ke Pimpinan. Saya minta di masa saya janganlah berpikir seperti itu bagaimana yang penting kalian bekerja, mengabdikan buat masyarakat, disitu nilainya dan disitulah rekan-rekan bisa kemudian berlomba untuk mencari prestasi yang terbaik.

Kemudian terkait dengan bagaimana konsep Polri. Tentunya terkait dengan pertumbuhan ekonomi ini stabilitas Kamtibmas itu menjadi salah satu faktor kunci. Dalam situasi seperti saat ini bagaimana kemudian Polri hadir bisa memberikan penguatan terhadap pertumbuhan-pertumbuhan baik yang model UMKM seperti tadi kami sampaikan jangan sampai kegiatan Polisi mengganggu kreatifitas. Jadi bagaimana kita kemudian mengedukasi perkembangan-perkembangan baik di UMKM, terus kemudian kemungkinan adanya sektor investasi yang masuk, bagaimana kita bisa memberikan rasa aman sehingga investor baik di dalam negeri atau pun di luar negeri itu betul-betul nyaman dan kemudian mereka bisa membangun suatu iklim investasi yang kemudian menyerap tenaga kerja dan tentunya dari sini pertumbuhan ekonomi akan terjadi. Jadi wajib bagi Polri hukumnya untuk bisa memberikan rasa aman, menjaga dan mengawal iklim pelaku usaha baik dari mulai yang terkecil sampai yang besar dalam rangka untuk segera mengembalikan pertumbuhan ekonomi di dalam situasi pandemi yang sedang berjalan ini.

Karena inilah kesempatan kita untuk *reborn* bisa lebih baik dari pada negara lain dan kuncinya adalah bagaimana kita menjaga Kamtibmas memberikan kenyamanan kepada masyarakat untuk bisa berusaha dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Terkait dengan masalah kejadian *extra judicial killing* yang direkomendasikan oleh Komnas HAM, tentunya kami dalam posisi sikap mematuhi dan menindak lanjuti rekomendasi dari Komnas tentunya kita akan ikuti. Namun harus dibedakan bahwa protokol kesehatan itu harus tetap kita tegakan karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Bagaimana supaya masyarakat tetap bisa kita jaga. Kita lihat sampai hari ini angkanya sudah diatas 14.000 barang kali 13, 14

**KETUA RAPAT:**

Baik cukup.  
Saudara calon waktunya sudah habis.

**CALON KAPOLRI (Komjen Pol. Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.):**

Jadi begitu Pak protokol kesehatan harus tetap kita proses. Untuk masalah kilometer 50 kita ikuti rekomendasi Komnas.  
Terima kasih pak.

**KETUA RAPAT:**

Baik kita masuk kepada Fraksi yang berikut adalah Fraksi Partai Demokrat. Kami persilakan.

**F-PD (DR. HINCA IP PANDJAITAN, S.H., .M.H., Accs):**

Terima kasih Pimpinan.  
Dari Fraksi Partai Demokrat kami persilakan saudara Benny K. Harman untuk menyampaikan pertanyaan.  
Terima kasih.

**F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Baik tugas saya untuk menyampaikan pertanyaan kepada calon Kapolri yang baru. Ini disusun setelah dalam satu minggu ini kami mendengarkan masukan masyarakat. Apa yang menjadi kepedulian dan harapan mereka kami sampaikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Tugas Kepolisian itu memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, tapi faktanya banyak sekali Anggota Polisi yang tidak melindungi masyarakat misalnya ikut dalam penanganan kasus-kasus tanah yang belum jelas asal-usulnya, ikut dalam kasus-kasus tambang ilegal yang merugikan masyarakat. Apa rencana aksi Bapak calon Kapolri nantinya?
2. Berkaitan dengan kejahatan-kejahatan luar biasa kami belum menemukan agenda yang lebih tajam untuk menangani kasus-kasus terorisme, radikalisme, narkoba dan *illegal logging*, *illegal mining* kasus

kejahatan lingkungan. Seperti apa solusi bapak nantinya? Indonesia negara Kepulauan, Provinsi-Provinsi Kepulauan tapi tidak ada sarana-prasarana untuk mengejar penjahat-penjahat narkoba dan teroris. Apa solusi bapak?

3. Kami belum melihat penajaman dukungan Institusi Kepolisian terhadap KPK sebagai garda paling kedepan dalam hal pemberantasan korupsi. Ada kesan Institusi ini menghambat-hambat KPK ini. Apa rencana bapak kedepan untuk mendukung supaya Institusi Kepolisian mendukung KPK habis-habisan.
4. Tugas bapak sebagai Pimpinan paling tinggi di Institusi ini adalah menjamin netralitas Institusi ini dalam netralitas. Utamanya dalam agenda-agenda politik Pemilu, Pilpres, Pilkada. Apa agenda bapak untuk menjamin misalnya tadi Babimkamtimbmas di desa-desa tidak menjadi alat kekuatan politik tertentu untuk mensukseskan parpol tertentu dalam Pemilu nantinya.
5. Indonesia ini masyarakat majemuk, menegakan aturan hukum ini haruslah adil dan humanis. Tadi ada yang mengatakan jangan hanya tajam kebawah tapi tumpul keatas saya tambahkan lagi jangan hanya tajam ke kanan tapi tumpul ke kiri. Jangan hanya tajam untuk kami yang diluar pemerintahan sedangkan teman-teman yang ada di dalam kok tumpul dia kan gitu Pak, lebih lugas lagi saya *stop* disitu. Kemudian
6. Hak atas kebebasan bersrikat dan berkumpul itu adalah hak asasi tapi tegakanlah aturan hukum supaya jangan ada *hates speech* ada *hoaks* dan segala macamnya itu. Kita dukung penuh tapi apa yang bapak lakukan untuk menjamin supaya penegakan hukum ini tidak hanya ditujukan kepada kelompok tertentu tapi kelompok lainnya semacam dikasih keleluasaan. Yang terakhir Bapak
7. Agenda reformasi internal tadi sudah disebutkan Lembaga ini yang paling banyak. Dana APBN paling banyak masuk di lembaga ini, pasukan juga banyak, kewenangannya juga luar biasa. Harapan kami adalah Bapak menjadi Pimpinan paling tinggi supaya membawa membangun habitus baru di lembaga ini, habitus lama Bapak tinggalkan dan habitus baru bapak bangun. Pertanyaannya bagaimana bapak membangun habitus baru itu? Membangun habitus baru mencegah penyalahgunaan kewenangan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sebagai *closing*.

Saat ini bapak ada enam puluhan ribu kasus yang mangkrak di lembaga ini tidak jelas penyelesaiannya. Inilah tantangan Bapak pertanyaan kami tolong kami dikasih sedikit apa yang Bapak lakukan nanti untuk mengatasi menyelesaikan puluhan ribu kasus yang mangkrak ini.

Itu saja Bapak Ketua Komisi/Pimpinan Komisi dan yang kami hormati saudara calon Kapolri

Soal sikap Fraksi selanjutnya ada bagian khusus yang akan menyampaikan ini. Secara pribadi tentu saya menyampaikan penghargaan terutama kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah berkenan mengajukan Bapak menjadi Pimpinan paling tinggi di lembaga ini.

Terima kasih banyak.

**KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih.

Yang berikut Fraksi Partai Nasdem Pak Ketua Fraksi AA silakan.

**F-P.NASDEM (AHMAD H.M ALI, S.E):**

Terima kasih atas izin Pak Syahrini.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*  
Selamat siang salam sejahtera untuk kita sekalian.

Pimpinan Komisi III yang saya hormati  
Pak Sigit selaku calon Kapolri beserta tim yang mendampingi beliau hari ini yang saya hormati  
Teman-teman Anggota Komisi III yang hadir pada acara *Fit and Proper Test* pada hari ini baik yang langsung maupun virtual yang sama-sama saya banggakan

Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap Pak Sigit selaku calon Kapolri atas keberaniannya mengakui dihadapan kita semua dihadapan masyarakat Indonesia bahwa hari ini ada *problem* internal Kepolisian, sehingga kemudian pelayanan terhadap masyarakat belum maksimal, artinya ada oknum Polisi yang belum memahami secara utuh tentang visi Kepolisian sendiri. Keberanian kejujuran ini tentunya memberikan optimisme dan harapan bagi kita untuk kedepan. *Insyah Allah* ketika beliau diberi kepercayaan untuk memimpin Kepolisian beliau akan memperbaiki hal-hal tersebut dan bertindak secara tegas untuk menertibkan oknum-oknum yang kemudian menyalahi prinsip-prinsip Kepolisian yang mengakibatkan penilaian *public* terhadap Kepolisian menjadi lemah.

Yang selanjutnya saya kebetulan dari Dapil Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah kalau bicara Sulawesi Tengah yang ada dipikiran kita ada terorisme, ada Poso. Hari ini saya ingin bilang begini, persoalan teroris di Poso itu sudah berlangsung sekian tahun dari satu operasi ke operasi berikutnya dan setiap permasalahan yang terjadi Polisi sepertinya gagap menghadapi persoalan itu. Artinya apa, reaksional setiap ada permasalahan tiba-tiba semua dari jajaran Mabes sampai tingkat Polda bereaksi dan bahkan sampai hari ini saya kasihan sama Kapoldanya, disuruh ngepos di Tokorondo tidak tahu bikin apa di sana. Nah, saya berharap ketika Pak Sigit jadi Kapolri segera tarik Kapolda-kapolda jangan lagi berkantor di Desa Tokorondo, karena permasalahan Kepolisian Sulawesi Tengah itu tidak hanya di Poso. Pelayanan terhadap *public* itu masih banyak. Nah, permasalahan Poso ini

harus diselesaikan secara komprehensif dengan cara yang tidak gagap seperti ini harus ada pendekatan-pendekatan. Polisi jangan pernah berpikir bahwa dia lebih tahu untuk menyelesaikan permasalahan Poso, permasalahan teroris itu, tapi ada pendekatan-pendekatan lain yang harus berani dilakukan harus ada berani evaluasi. Puluhan tahun dilakukan pengejaran terhadap teroris Poso sampai hari ini belum berhasil. Artinya apa, ada yang salah penanganan itu. Nah, saya minta Pak Sigit bisa memberikan penjelasan kepada kami kira-kira seperti apa langkah-langkah yang akan diambil berikutnya.

Terus kedua, di permasalahan Kepolisian saya tidak akan bertanya kepada Pak Sigit tentang persoalan reserse karena Bapak saya yakin adalah ahlinya. Tapi kemudian ada permasalahan klasik di Kepolisian ini di tengah-tengah masyarakat hari ini yang mestinya menjadi tanggung jawab Kepolisian yaitu dibidang lalu lintas. Di bidang lalu lintas kalau kemudian kita lihat permasalahan kota-kota besar khususnya Jakarta, Jabodetabek, yang terjadi hari ini permasalahan kemacetan yang begitu luar biasa. Kelalaian Kepolisian dalam mengatur lalu lintas kemudian dipertanggungjawabkan oleh Kepala-Kepala Daerah. Nah, kenapa kemudian menjadi rumit permasalahan ini perlu penanganan secara sistematis, karena salah satu permasalahan kemacetan lalu lintas ini disebabkan setiap tahun pertumbuhan kendaraan itu semakin meningkat, di sisi lain penambahan jalur jalan itu cenderung stagnan, sehingga kemudian tentunya perlu penanganan secara serius. Akibat kemacetan ini tidak hanya menyebabkan kerugian psikologi bagi masyarakat tapi juga kerugian secara material. Khusus untuk Jabodetabek menurut penelitian Bank Dunia ada kurang lebih sekitar 60 sekian triliun kerugian masyarakat Jabodetabek akibat kerugian dalam setiap tahun dan bukan hanya itu ada akibat kemacetan ini mengakibatkan *fatalism* masalah kecelakaan. Nah, ini juga perlu penanganan atau perlu langkah-langkah strategis.

Nah hari ini saya mau ingin mendengar dari Pak Sigit selaku calon Kapolri kira-kira ketika Bapak ditugaskan oleh negara menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia apa langkah-langkah yang kemudian akan dilakukan dan ditawarkan kepada masyarakat di Indonesia dan memberikan jaminan kepada masyarakat Indonesia bahwa ketika Bapak akan jadi Kapolri ada solusi yang bisa diberikan oleh Pak Sigit untuk mengurangi kemacetan. Nah apalagi tadi saya mendengarkan bahwa Pak Sigit ketika jadi Kapolri nanti akan meniadakan tilang, padahal penilangan ini menjadi salah satu solusi penindakan untuk kemudian mengurai menurut saya yang tidak memahami tentang persoalan itu. Tapi mungkin saya sepakat kalau kemudian nanti yang dikurangi itu adalah pungli terhadap penilangan. Jadi ketika ada pengendara pengguna jasa lalu lintas ini melakukan pelanggaran itu harus ditindak secara terbuka. Mungkin dengan inovasi e-tilang dan lain-lain sehingga kemudian tidak ada lagi pungli di jalanan, tapi menurut saya penilangan ini menjadi salah satu solusi untuk kemudian mengurangi penambahan atau kepadatan lalu lintas di jalan.

Saya pikir saya tidak lagi bertanya yang lain karena tadi beberapa pertanyaan saya siapkan setelah Pak Sigit menyampaikan paparannya

ternyata itu sudah terangkum secara keseluruhan, sehingga pertanyaan itu menjadi batal untuk saya tanyakan kepada Bapak, tapi sebelum saya menutup sekali lagi saya berharap ke Pak Sigit tentang, karena ini menjadi persoalan saya Pak Ketua. Setiap kali saya reses di dapil pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh masyarakat kepada saya tentang keseriusan negara menyelesaikan permasalahan Poso. Konon hanya 11 (sebelas) orang pengganggu teroris yang ada di sana tapi sampai hari ini tidak pernah bisa diselesaikan. Apakah negara serius atau tidak, karena logikanya dengan 11 (sebelas) orang dengan pasukan begitu banyak rasa-rasanya tidak mungkin untuk kita tidak diselesaikan. Nah, kita butuh cerita atau strategi apa yang kemudian akan disampaikan oleh Pak Sigit untuk menangani itu. Solusinya saya yakin bukan Kapolda berkantor di Tokorondo Pak. Kapolda itu ada di Ibukota Provinsi untuk melayani masyarakat dibidang-bidang lain.

Yang saya minta ketika Pak Sigit diangkat menjadi Kapolri maka saya minta Sulawesi Tengah langkah pertama yang harus dilakukan adalah menarik Kapolda dari Tokorondo masuk ke Polda Sulawesi Tengah. Saya pikir itu dan yang terakhir saya menyampaikan *closing statement* saya bahwa hari ini banyak masyarakat Indonesia berharap kepada Pak Sigit untuk memperbaiki wajah Kepolisian kedepan sehingga kemudian Polisi kedepan bisa menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Sekian.

*Wabillahi taufik walhidayah  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

#### **KETUA RAPAT:**

Yang terakhir Fraksi PKB kami persilakan.

#### **F-PKB (H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, M.A.P.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Salam sejahtera untuk kita semua.  
Om swastiastu, salam kebajikan, namo budaya.*

Terima kasih Pimpinan Komisi III yang telah memberikan kepercayaan kepada Fraksi PKB untuk *closing* diantara Fraksi sebetulnya bukan menyempurnakan sudah semua sempurna. Terutama tadi Bang Hinca bukan luar biasa, diatas luar biasa ini Pak. Pak calon Kapolri Pak Komjen Sigit yang saya ucapkan selamat Pak atas kepercayaan Pak Presiden bapak ditunjuk sebagai calon Kapolri Insya Allah pada hari ini kita akan lakukan tahapan-tahapan sampai seluruh pandangan Fraksi yang saya yakin semua akan berpendapat sama. Ada satu hal yang perlu dititipkan karena saya tidak berbicara kebelakang saya bicara kedepan. Pak kita ini dirundung pandemi yang mungkin belum jelas sampai kapan ini Pak. Ada tugas yang harus dihadapi Polri yaitu bagaimana dalam kondisi pilihan moderat diambil Pak Presiden ini luar biasa Pak jadi satu sisi kesehatan tetap dijaga tapi ekonomi jangan sampai jatuh ke jurang yang lebih dalam Pak. Karena untuk *reborn* di ekonomi juga ini perlu ada andil dari jajaran Kepolisian Pak.

Tadi sahabat-sahabat menyampaikan seperti ada case terorisme, kemudian case bagaimana ada kelompok kriminal bersenjata ini yang harus diselesaikan jangan menjadi satu pekerjaan rumah yang tidak tuntas-tuntas Pak. Bagaimana langkah-langkah deteksi dini yang akan dilakukan oleh bapak nanti kedepan, karena *trust* internasional bahkan mereka mau masuk ke kita investasi dengan sudah payung hukum disiapkan oleh kita ini kan Polri pasti akan terdepan diharapkan oleh masyarakat oleh negara untuk membuktikan *trust public* sehingga orang itu nyaman dan aman berada di Indonesia. Bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan oleh bapak termasuk Pak ini pernyataan dan pertanyaan dari dapil Pak, bukan hanya dapil mungkin semua lah. Hari ini beredar berita bahwa lulusan Madrasah Aliyah dilarang masuk Perguruan Tinggi Negeri. Ini jangan ada Pak nanti *statement-statement* semacam ini di jajaran Polri karena ini melukai dan bisa membuat gejolak ditengah masyarakat saya titip Pak, karena tadi tugas dari Pak Ketua juga berbicara di daerah pemilihan dan sesuai MD3 saya mewakili komponen dan komunitas dari Madrasah Pak, saya anak Madrasah.

Saya minta nanti ada tadi kita apresiasi apa yang Bapak sampaikan mengenai Polri penataan dari pada apa tadi kita lihat di halaman 21 transformasi organisasi bagaimana SDM Polri yang unggul di era 4.0. Kita berharap Pak bagaimana lulusan-lulusan pesantren yang kita juga sudah punya regulasi atau Undang-Undang 18 Tahun 2019 ada rekognisi pengakuan kelulusan mereka juga bisa punya kesempatan. Karena Bapak tadi luar biasa menyampaikan dalam paparannya Pak, kedepan mereka akan kembali ke tengah masyarakat dan mereka ini akan melebur bukan hanya bersama mungkin dari komuditas agama yang lain juga dari Hindu, dari Budha, kemudian dari Kristen atau dari semua komunitas ini yang mereka akan kembali sesuai dengan lingkungannya itu. Nah, afirmasi ini harus ada dan bagaimana nanti dalam penerimaan SDM kedepan itu diharapkan karena kalau dari sisi kuantiti ini kan kita masih terjadi permasalahan Anggota Polri ini Pak. Berapa jumlah populasi kita dibanding dengan Anggota Polri yang ada ini kan jadi pemikiran dan kita nanti kedepannya Pak Pimpinan/Pak Ketua dan semua kita *support* kedepan Pak Kapolri menjalankan tugasnya ini dengan dari sisi fungsi yang ada di DPR RI yaitu fungsi *budgeting* bagaimana bisa rekrutmen Anggota untuk bisa mengimbangi kedepan jumlah populasi penduduk Indonesia dan tadi sarana prasarana baik Polsek yang masih memegang beberapa Kecamatan atau Polres masih memegang beberapa Kabupaten Kota atau Polda masih memegang beberapa provinsi, ini harus segera diselesaikan dan kita *support* dari DPR RI. Bagaimana kedepan Polri bisa melakukan yang luar biasa kita apresiasi ini dengan presisinya yang akan dibawa oleh Pak Komjen Sigit kedepan.

Selamat sekali lagi Pak semoga bapak dilancarkan dalam menjalankan tugasnya dan soliditas yang bapak akan bangun ini akan menjadi bagian catatan sejarah bagi kita semua.

Terima kasih.

*Wallahul muwafiq ila aqwamit tharieq.  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

Baik

Bapak/Ibu sekalian, sebelum kita teruskan sesuai kesepakatan kita tadi bahwa rapat ini akan kita selesaikan pada jam 13.00 WIB siang. Namun saya melihat waktu kurang 12 menit lagi. Kalau disetujui saya akan perpanjang rapat ini 30 menit menjadi 13.30 WIB.

Apakah disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Silakan Saudara calon menjawab 10 menit.

**CALON KAPOLRI (Komjen Pol. Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.):**

Terima kasih Bapak Pimpinan Komisi III.

Ada tiga pertanyaan khususnya Pak Benny ada tujuh lebih. Mudah-mudahan kami bisa jawab semua. Yang pertama terkait dengan masalah penyimpangan yang terjadi di dalam Anggota Polri. Sebagaimana tadi sudah kami sampaikan dari awal kami masuk dengan program Polisi presisi ini tentunya untuk mengubah tampilan dan postur Polri. Kita buka pengawasan bagaimana konektifitasnya dengan Lembaga lain dengan pengawasan lain. Ini adalah dalam rangka jangan sampai muncul penyimpangan-penyimpangan yang kemudian tidak bisa ditangani. Oleh karena itu jelas sikap kami bahwa terhadap hal-hal yang sifatnya menyimpang tentunya kami yang akan melakukan mekanisme mulai dari mekanisme internal yang ada di Propam sampai dengan apabila memang itu tidak bisa dituntaskan tidak bisa diingatkan maka proses penegakan hukum yang lain pun bisa kita terapkan. Intinya Polisi harus menjadi contoh, harus menjadi teladan sehingga masyarakat betul-betul mentaati Polri.

Kemudian terkait dengan masalah pencegahan terorisme, masalah narkoba tentunya kami sangat berterima kasih Pak kalau kedepan memang nanti kami bisa dibantu untuk pengembangan terhadap sarana dan prasarana khususnya memang di di wilayah kita banyak sekali pelabuhan-pelabuhan tikus yang kemudian juga transaksi narkoba yang saat ini cenderung menggunakan skema *ship to ship* di zona ekonomi eksklusif sehingga tentunya kita juga butuh sarana prasarana untuk mendukung baik di IT-nya maupun diangkutan lautnya sehingga kita mampu menangkap. Selama ini kita lakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian yang lain namun tentunya kita akan sangat bangga kalau kita juga kedepan memiliki sendiri sehingga kita bisa melakukan penanganan terhadap masalah-masalah penyelundupan ini masalah kejahatan-kejahatan di laut ini dengan baik.

Kemudian terkait dengan KPK Pak sampai dengan saat ini hubungan kami dengan KPK sangat baik Pak. Jadi terkait dengan penyiapan personil sampai saat ini personil Polri selalu diberikan kesempatan untuk mengisi dan memperkuat KPK baik di jajaran penyidikannya, di jajaran yang terkait dengan kegiatan-kegiatan koordinasi dan sebagainya. Sehingga tentunya ini menjadi sesuatu yang harus kami pertahankan. Kegiatan penyidikan kami tidak

menutup bahkan beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa kami sejak awal membuka ruang untuk KPK ikut gabung dengan kami. Pada saat kami mulai melaksanakan penyidikan atau penyelidikan terhadap kasus tertentu ini menunjukkan bahwa kami terbuka untuk hal-hal yang sifatnya seperti itu *join investigasi*, bila perlu wewenang supervisi. Karena memang mana kala pekerjaan mana kala pekerjaan itu mangkrak maka supervisi KPK memberikan wewenang untuk mengambil alih atau mengingatkan kepada kita ini kasusnya berhenti kenapa sampai dimana. Jadi kami dalam posisi yang sangat solid Pak dengan KPK dan tentunya komitmen kami juga untuk bagaimana mengedepankan upaya pencegahan dari pada penindakan sehingga bagaimana menghilangkan *mensrea* niat, kemudian bagaimana memberikan asistensi terhadap kegiatan yang terkait dengan program pemulihan ekonomi nasional supaya tidak ada kebocoran, supaya.

Hal-hal yang kemudian itu kita lakukan sehingga lebih baik kita cegah dari pada sudah terjadi hal-hal tersebut kita lakukan. Namun tetap kita melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggaran tindak pidana korupsi dan kami siap untuk *join* dengan KPK atau pun dengan Kejaksaan sehingga postur penegakan hukum khususnya terkait dengan masalah tipikor itu kami kompak Pak Kejaksaan, Kepolisian dan KPK. Kemudian terkait dengan kami akan jaga Pak supaya bisa berdiri ditengah memberikan rasa keadilan pada semuanya. Namun tentunya yang harus selalu kami sampaikan terkait dengan *hates speech* kalau masih biasa-biasa tentunya akan kita tegur minta maaf selesai, tapi yang beresiko memecah belah persatuan bangsa kami tidak ada toleransi pasti kami proses. Jadi supaya kita bisa jaga dimana kita bolehkan, dimana tidak ini menjadi kedewasaan dalam kita memanfaatkan ruang *cyber* memanfaatkan ruang *public* sehingga bisa sama-sama diciptakan kehidupan yang saling menghormati, mana yang tidak boleh dan mana yang masih ada toleransi. Hal-hal tersebut yang tentunya harus kita jaga.

Kemudian kebebasan berkumpul. Memang di masa pandemi ini, ini menjadi kendala tersendiri mungkin kedepan Pak kita siapkan nanti kami koordinasi dengan Kementerian terkait untuk bagaimana memberikan hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat dimuka umum tapi dengan melaksanakan protokol kesehatan. Nanti kami pikirkan sehingga Undang-Undang Nomor 9 bisa terlaksana tapi protokol kesehatan tidak boleh dilanggar, karena memang keselamatan rakyat yang harus kita jaga. Bagaimana kemudian seorang yang terkena dampak dia OTG karena tidak ketahuan kemudian menularkan dan itu beresiko bagi masyarakat yang lain. Ini kita lihat angkanya sangat tinggi jadi hal ini nanti akan kita bicarakan secara khusus, koordinasi secara khusus sehingga apakah kemudian kebebasan berpendapatnya menggunakan ruang *cyber* tapi tentunya tadi itu harus bisa membedakan antara etika ataupun hal-hal ataupun norma-norma yang tidak boleh dilanggar. Saya kira kita semua belajar untuk memahami dan belajar tentang aturan-aturan yang ada.

Kemudian terkait dengan masalah lalu lintas Pak terima kasih, yang jelas terkait dengan pelanggaran lalu lintas khususnya di daerah-daerah kemacetan di kota besar tilang masih tetap diperlukan. Yang kami hindarkan

adalah interaksi, interaksi Anggota dengan masyarakat yang kemudian itu menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan oleh karena itu penting kemudian bagaimana kita memodernisasi sistem tilang dengan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. Jadi tidak hanya Polisi tapi kita kerja sama dengan Pemerintah Daerah bila perlu sehingga kemudian kita bisa mencoba meniru di luar negeri terkait dengan pelanggaran jelas, hukumannya jelas dan peran Polisi disitu seperti apa, tidak ada ruang untuk titip sidang karena itu yang paling berbahaya itu bisa jadi ya salah proses sidang secara bertahap seperti itu, tapi kedepan kita akan menggeser kita modernisasi sehingga interaksi dengan Kepolisian khususnya Anggota lalu lintas bisa kita hindari. Jadi Anggota lalu lintas datang di jalan mengatur kemacetan lalu lintas tampil disitu jadi itu akan lebih bagus buat kita semua kedepan.

Kemudian Pak Cucun mohon izin, kalau memang dari madrasah tadi Pak ya aliyah kalau memang ada yang berminat jadi Polisi Pak biar nanti Anggota kita datang tengok Pak kalau memang kita butuh Anggota Polri yang memiliki kemampuan mengaji yang baik, hafal quran, dia bisa memberikan edukasi memimpin di masyarakat jadi Anggota yang bisa jadi teladan kalau tempat lain nggak bisa kami dari Polri siap Pak untuk hal yang seperti itu.

Terkait dengan penanganan teroris Pak tentunya kita memang harus berpikir mulai dari tahapan bagaimana mencegah konsep pemanfaatan melalui teknologi informasi. Jadi kerja sama kami dengan Kominfo untuk kemudian begitu itu ada konten yang bernuansa memunculkan ajaran-ajaran atau terdeski itu adalah upaya untuk memunculkan ajaran-ajaran yang mengarah ke teroris maka memang kemudian itu jangan sampai muncul di *take down* dan kemudian memang harus ada langkah yang tegas sehingga itu tidak muncul lagi dengan proses-proses penegakan hukum dengan berani untuk kemudian menghapus itu di dunia maya dengan membuat suatu regulasi ataupun aturan-aturan yang kuat. Kemudian tentunya bagaimana kita bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ulama untuk kemudian melakukan upaya pencegahan dengan memberikan penjelasan supaya masyarakat tidak mudah terpapar dengan ajaran-ajaran seperti itu. Seperti dulu di Banten saya pernah sampaikan Anggota wajib untuk belajar kitab kuning, karena kami mendapatkan masukan dari ulama-ulama yang kami datangi bapak untuk mencegah berkembangnya terorism salah satunya adalah dengan belajar kitab kuning dan tentunya baik di external mau pun di internal itu saya yakini bahwa apa yang disampaikan oleh kawan-kawan ulama itu benar adanya oleh karena itu, itu akan kami lanjutkan Pak. Kemudian penegakan hukum secara tegas terkait dengan teroris tentunya tetap harus kita lakukan. Manakala upaya edukasi upaya pencegahan sudah kita lakukan namun itu tetap terjadi. Maka karena itu menyangkut masalah keselamatan rakyat, keselamatan bangsa dan keselamatan negara maka tindakan tegas tetap harus dilakukan. Namun tentunya harus dengan memperhatikan asas-asas yang ada di dalam hak asasi manusia.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik cukup saudara calon.

**CALON KAPOLRI (Komjen Pol. Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.):**

Mungkin itu Pak terima kasih. Kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Komisi.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Dengan demikian semua Fraksi sudah menyampaikan pertanyaan, masukan dan harapan. Kini giliran dari meja Pimpinan semua Pimpinan ingin menyampaikan. Saya mulai dari sebelah kanan saudara Syahroni 3 menit saya beri waktu.

Silakan.

**F-P.NASDEM (H. AHMAD SAHRONI, SE, M.I.Kom.):**

Terima kasih.

Yang terhormat Pimpinan Komisi

Yang terhormat Ketua Fraksi saya Ahmad Halim atas izinnya saya duduk disini

Yang saya hormati Pak calon Kapolri beserta jajarannya baik dari senior sampai junior

Tidak banyak Pak Sigit, tentang program Bapak presisi saya menarik dengan resposibilitas. Saya bukan bertanya tapi menyampaikan masukan bila mana Pak Sigit dilantik menjadi Kapolri untuk memerintahkan para Kapolda sampai ke Kapolsek agar berkomunikasi yang sangat baik. Gunakanlah teknologi yaitu handphone agar bersapa kepada semua pihak sekali pun tukang parkir yang berkomunikasi dengan bintang dua untuk para Kapolda ini himbuan Pak Kapolri. Karena Polri adalah memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat dari Sabang sampai Marauke. Apresiasi untuk program Pak Kapolri *this is a new hope*, ini adalah harapan baru Polri kedepan. Kita berpaku pada Pak Sigit agar Polri menjadi soliditas kuat baik kepada senior dan juniornya. Mungkin itu dari saya Pak Kapolri.

Terima kasih Pimpinan.

*Wabillahi taufik hidayah.*

*Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

Baik jadi apa yang disampaikan oleh Pak Syahroni tadi bukan pertanyaan tetapi masukan dan harapan. Saya berikut Pak Desmond.

Silakan.

**F-P.GERINDRA (H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H., M.H.):**

Terima kasih.

*Asalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yang pertama saya mengapresiasi tentang presisi ini. Ini suatu kajian yang tadi malam saya baca bolak-balik dan ini sebenarnya harapan rakyat sebenarnya. Kenapa, misalnya kalau kita bicara tentang prediktif ini kan tidak sederhana, bicara prediktif ini kan perlu *big data* yang kesiapan antara Bimas di lapangan dalam rangka memprediksi awal baik pelaku kejahatan, kejahatan sendiri dan analisis terhadap kejahatan ini kan memerlukan kesiapan Aparat Kepolisian baik secara teknologi maupun peran-peran Bimas dan Intel di tengah masyarakat. Maka penyakit masyarakat saya pikir kalau ini berjalan dengan baik wajah Sipil Polisi yang diharapkan oleh rakyat itu semakin konkrit. Bicara tentang presisi prediktif, resposibilitas, transisi, berkeadilan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau satu presisi ini kita kaji secara mendalam dengan kajian-kajian hukum pidana ada hal yang menggelitik kita bagaimana dengan kasus Nenek Minah, bagaimana dengan kasus Sarimin, bagaimana dengan kasus ada seorang anak yang melaporkan mempidanakan ibunya padahal dalam hukum acara pidana dan hukum pidana materilnya proses *restorative justice* belum maksimal. Berarti akan ada perubahan Undang-Undang hukum acara pidana, hukum pidananya sendiri yang kemarin sebenarnya sudah ada termasuk Undang-Undang Kepolisian harus kita amandemen. Yang cukup menarik Pak Sigit, *restorative justice* dalam kasus-kasus yang dilakukan terhadap Nenek Minah, Sarimin dan pelaporan terhadap Ibu ini-ini contoh konkrit dari presisi ini. Saya ingin ada hal yang lebih konkrit dijawab oleh Pak Sigit tentang gambaran ini.

Yang kedua, bicara presisi ini ada juga yang contoh menarik yang sudah terjadi di tengah masyarakat. Ada peradilan perdata, sudah putus, inkrah tapi tidak menutup kemungkinan dan kebanyakan dipengalaman praktek saya sebagai *lawyer* itu dipidanakan. Yang sudah putusan perdata dicari lubang-lubang pidananya akhirnya putusan perdata abai karena putusan pidana, padahal putusan perdatanya lebih dulu. Maka kalau kita bicara tentang konsep presisi ini saya pikir contoh-contoh konkrit ini jadi menarik yang harus dilakukan ketelitian-ketelitian Kepolisian dalam rangka mengkonkritkan program-program yang hari ini dipresentasikan oleh calon Kapolri.

Yang terakhir salam dari kesepuhan, Kyai dan tokoh ulama bahwa pengalaman di Banten pada saat Kapolda itu adalah harapan yang dititip kepada Pak Sigit seandainya terpilih jadi Polisi jadi Pimpinan Polri. Pengalaman berdialog dengan tokoh-tokoh pesantren, dengan tokoh-tokoh agama yang tadinya cukup reaktif di Banten pengalaman itu adalah contoh yang bagi masyarakat Banten adalah harapan Pak Sigit sebagai Kapolri seperti adanya pada waktu jadi Kapolda Banten. Demikian.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

Baik juga dari Pak Desmond lebih banyak masukan dan harapan. Kemudian saya persilakan Pak Pangeran.

**F-PAN (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH):**

Terima kasih *Chief*.

Pak Sigit beserta jajaran yang saya hormati

Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Pak Sigit atas dipilihnya oleh Bapak Presiden menjadi calon Kapolri. Tentu Presiden punya pengharapan yang besar kepada Pak Sigit bisa membawa Polri lebih baik dan bisa membawa Indonesia maju kedepan.

Saya hanya memberikan masukan dan harapan sekaligus juga mengingatkan saya tidak menyampaikan pertanyaan. Kilas balik 14 bulan yang lewat pada saat *Fit and Proper Test* Pak Idham sebagai calon Kapolri dengan bangga beliau menyampaikan sebuah *statement* dan komitmen bahwa beliau menyatakan Islam tidak identik dengan radikalisme. Presiden juga telah menyatakan melalui Deputi 5 staf Presiden bahwa Islam tidak identik dengan radikalisme dan terorisme. Jadi saya berharap Bapak juga punya *statement* dan komitmen yang sama bahwa Islam tidak identik dengan radikalisme.

Selanjutnya saya ingin menyampaikan dan harapan pada halaman 94 *roadmap* Polri terkait dengan program kinerja penegakan hukum harapan saya, saya ingin Polri kedepan berbenah dalam penegakan hukum, adil dalam penegakan hukum, tidak terbang pilih tanpa pandang bulu. Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) *equality before the law* ini betul-betul dilaksanakan. Polisi betul-betul netral, betul-betul sebagai penegak hukum milik masyarakat bukan sebagai alat pejabat atau alat seseorang apalagi sebagai alat kekuasaan. Saya tadi menggarisbawahi komitmen bapak kedepan tidak boleh lagi ada hukum tajam ke bawah tumpul keatas dan saya juga berharap tidak ada lagi kriminalisasi oleh para penyidik oknum penyidik dimana pun baik di Polres, di Polda maupun di Bareskrim.

Sebagaimana yang pernah saya sampaikan beberapa hari yang lewat kepada Bapak dan yang terakhir sesuai grand strategi dan *roadmap* Polri juga adanya perubahan *tagline* dari Polri Promoter menjadi Polri Presisi, disamping *roadmap* yang harus dijalankan secara berkesinambungan saya juga meminta Polri untuk memperhatikan 7 (tujuh) arahan Bapak Presiden yang disampaikan saat HUT Polri yang ke-74 antara lain:

1. Laksanakan nilai tribarata dan catur prasetya
2. Lakukan reformasi tata kelola yang partisipatif, transparan dan akuntable
3. Pentingnya soliditas internal
4. Tingkatkan pelayanan *public*
5. Penegakan hukum yang berkeadilan
6. Mendisiplinkan prokes Covid-19

7. Mendukung pemulihan ekonomi.

Jadi besar harapan saya semoga dibawah kepemimpinan Bapak Polri lebih baik dan Indonesia Maju. Selamat bekerja Pak Sigit.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik silakan Pak Adies Kadir.

**F-PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M. Hum):**

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang kami hormati  
Calon Kapolri beserta seluruh jajaran

Kalau melihat apa yang bapak paparkan tadi presisi, prediktif, kemudian responsibilitas dan juga transparansi berkeadilan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kalau kita memaknai presisi itu artinya ketepatan dan ketelitian Pak. Dengan beraninya calon Kapolri membuat satu moto presisi ini artinya bahwa kedepan Kepolisian Republik Indonesia dibawah Kepemimpinan bapak harus betul-betul berhati-hati, teliti dan tepat dalam menganalisa berbagai macam kasus dan berbagai macam persoalan bangsa kita yang ditangani oleh Kepolisian. Kita melihat apa yang disampaikan tadi oleh Pak Desmond bukan hanya pidana dan perdata yang dan lantas juga yang menjadi persoalan. Kami belum mendengar juga secara langsung tadi koordinasi dengan aparat-aparat penegak hukum yang lain termasuk dengan mitra-mitra kerja yang lain. Kalau pidana mungkin koordinasinya sudah biasa, tadi yang disebut ada terkait dengan perdata. Ada beberapa persoalan Pak misalnya membantu pengadilan dalam mengeksekusi lahan, mereka kesusahan dalam pembiayaan dan hampir tidak bisa dilakukan karena membayar biaya bantuan untuk pengamanan itu juga agak mahal biayanya. Nah, hal-hal seperti inilah koordinasinya dengan aparat-aparat yang lain kedepan harus betul-betul sesuai dengan takelain bapak presisi bukan hanya dibidang pidana tapi juga perdata dan di bidang-bidang lainnya. Ketepatan dan ketelitian menjadi ujung tombak dan menjadi hal yang paling penting dalam makna dari pada *tagline* yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dibawah kepemimpinan Bapak Komjen Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo kedepan semakin tepat dalam mengambil keputusan dan semakin teliti dalam menjaga keamanan bangsa dan negaranya.

Terima kasih.

*Wallahul muwafiq ila aqwamit tharieq.  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

Baik saudara calon 4 (empat) Pimpinan sudah bicara, giliran saya ingin memberikan masukan saja. Harapan saya seperti tadi yang lain juga lebih banyak masukan dan harapan. Satu hal yang saya ingin sampaikan kepada

saudara calon apabila saudara menjadi Kapolri nanti, karena sore ini akan kami lakukan rapat internal dan fraksi-fraksi akan memberikan pendapat. Namun sebelum itu saya berharap pertama persoalan narkoba. Pada pandangan akhir tahun saya bersama dengan BNN beberapa Minggu yang lalu dibulan Desember saya membuat satu *statement* bahwa persoalan narkoba itu bukan hanya kejahatan *extraordinary* tapi narkoba itu sudah menjadi kejahatan narko *terrorism, trust national crime*. Untuk menangani kejahatan narkoba yang sudah masuk dalam kerangka *trust national crime* tentunya Institusi Polri, BNN, juga harus memiliki konsep-konsep, terobosan-terobosan yang luar biasa, termasuk infrastruktur perawatan yang luar biasa dan satu hal yang paling penting aparat petugas yang punya integritas tinggi.

Kita sudah lihat beberapa waktu yang lalu sebulan, dua bulan, tiga bulan yang lalu mulai dari penangkapan ratusan kilo sampai berton narkotika bahan narkoba, sabu dan lain-lain. Kita masih ingat juga beberapa Minggu atau satu bulan, dua bulan yang lalu di Tanah Abang sekian banyak. Saya berharap cara-cara penindakan semacam itu terus dilanjutkan. Saya katakan waktu membuat *statement* akhir tahun bahwa Pimpinan Institusi Penegak Hukum jangan ragu-ragu memberikan *punishment* yang keras terhadap aparat yang terlibat dalam urusan narkoba. Namun juga jangan segan-segan memberikan *reward* kepada petugas-petugas, aparat yang sudah melaksanakan tugas dengan luar biasa. Kenapa saya katakan itu, karena saya tahu bahwa dalam menangani perkara mengungkap perkara narkotika dalam jumlah besar membutuhkan integritas dan pertaruhan yang luar biasa. Bisa berbulan-bulan mereka ada di lapangan dan saya berharap Institusi tidak segan-segan untuk memberikan *reward* agar rasa tanggung jawab dan kebanggaan dari pasukan, dari aparat, dari adik-adik kita yang sudah ada berbulan-bulan berjuang di lapangan mengungkap ini mereka tetap merasa bahwa mereka dihargai. Itu yang saya harapkan dari Pak Sigit jika menjadi Kapolri nanti.

Hal yang kedua ini suara dapil suara NTT. NTT ini orang selalu katakan nasib tidak tentu karena ada diujung sana dan daerah Kepulauan dengan 22 (dua puluh dua) Kabupaten dan Kota. Hari ini kami berharap kami membuat slogan baru nanti Tuhan tolong. Oleh sebab itu sebagai suara dari NTT mewakili Aparat Kepolisian di sana:

1. Kami meminta untuk kuota penerimaan Anggota Polisi ditambah, karena apa rasionya sangat rendah di NTT. Seperti yang tadi saudara calon katakan bahwa memberikan ruang peluang kepada putra daerah untuk menjadi Polisi dan mengabdikan di daerah asalnya. Kita tahu NTT penuh dengan keterbatasan infrastruktur dan macam-macam. Tolong diperhatikan supaya kuotanya ditambah.
2. Infrastruktur perumahan dan asrama. Kami melihat bahwa Anggota Kepolisian di NTT terutama Brimob sangat menderita karena tidurnya hanya di tenda dan bertahun-tahun, air pun tak ada.
3. Kami minta supaya ada apresiasi-apresiasi karena orang bertugas di NTT itu ada yang sudah 7 tahun, ada yang sudah 12 tahun, minimum 5 tahun tidak ada pergeseran sama sekali atau promosi. Mohon berkenan untuk mereka-mereka disana juga diperhatikan paling tidak diberikan prioritas

kesempatan kuota sekolahnya ditambah. Untuk supaya mereka juga walaupun bertugas disana punya harapan masa depan mereka.

Saya kira itu saja masukan dari saya permohonan dari saya sebagai wakil rakyat dari NTT. Kemudian kita sudah dengar semua penjelasan. Saya kira saya berikan satu kesempatan untuk saudara calon melakukan *closing statement* sebelum kita lanjutkan dengan acara penandatanganan.

Silakan.

**CALON KAPOLRI (Komjen Pol. Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.):**

Terima kasih Bapak Pimpinan Komisi III.

Yang kami hormati Bapak dan Ibu Anggota Dewan

Terima kasih kami pada siang hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan, memaparkan program rencana kami apabila kami diberikan amanah menjadi Kapolri. Tentunya setelah kami paparkan tadi dan kemudian kami juga mendapatkan masukan dan pertanyaan dari rekan-rekan yang ada di ruangan ini, tentunya ini menjadi catatan penting bagi kami untuk kemudian kami semakin memahami apa yang diharapkan oleh masyarakat tentang postur Polri yang kedepan betul-betul bisa memberikan harapan terkait dengan Polri harus seperti apa. Jadi terima kasih Pak Pimpinan Komisi kami telah catat semuanya Pak dan ini tentunya menjadi kajian kami selanjutnya manakala nanti kemudian kami menajamkan rencana aksi kami di dalam tahapan-tahapan yang akan kami laksanakan seandainya kami mendapatkan persetujuan dan yang terakhir tadi yang disampaikan oleh Pak Pangeran bahwa tidak ada satu agama pun yang mengajarkan masalah *terorism*. Semua agama mengajarkan kasih sayang termasuk Islam di dalamnya mengajarkan *rahmatan bil alamin* artinya *terorism* itu adalah cara dengan memanfaatkan ajaran-ajaran yang tentunya tidak tahu itu ajaran dari mana dan tentunya kita semuanya wajib memerangi. Sekali lagi *terorism* itu adalah musuh bersama kita semua jadi wajib bagi kita untuk mencekal, mencegah dan memerangi. Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Syalom, om shanti-shanti om.*

**KETUA RAPAT:**

Baik.

Hadirin yang kami hormati, secara keseluruhan jawaban dan paparan telah kita dengar dari saudara calon Kapolri. Selanjutnya kami minta kepada saudara calon Kapolri untuk menandatangani surat pernyataan yang ada di hadapan Saudara. Sebelum Saudara menandatangani itu kami minta untuk dibacakan lalu ditanda tangani dan diserahkan kepada kami. Kami persilakan.

**CALON KAPOLRI (Komjen Pol. Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.):**

Mohon izin Bapak Pimpinan Komisi III.

Perkenankan kami membacakan:

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.  
Tempat dan tanggal lahir : Ambon 5 Mei 1969.  
Pekerjaan : Polri  
Jabatan terakhir : Kabareskrim Polri  
Bertempat : Jakarta Selatan,

Dengan ini menyatakan secara jujur dan sebenarnya serta bersedia untuk mengangkat sumpah janji menurut agama yang saya anut agama Kristen Protestan bahwa seluruh pernyataan keterangan informasi dan atau bukti yang saya nyatakan berikan atau sampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada Komisi III DPR RI adalah benar guna memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahwa apabila saya mendapatkan persetujuan menjadi Kapolri saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban saya dalam jabatan tersebut dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya serta akan tetap teguh melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban saya yang diamanatkan oleh Undang-Undang kepada saya.

Bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya atas pernyataan saya ini dan bersedia dituntut menurut hukum apabila pernyataan saya ini terbukti tidak benar baik untuk sebagian ataupun untuk seluruhnya. Saya bersedia untuk mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Kapolri setelah mendapatkan persetujuan.

Demikian surat pernyataan tertulis ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan atau pun tekanan dari manapun di hadapan Komisi III DPR RI pada tanggal 20 Januari 2021.

Jakarta 20 Januari 2021  
Yang menyatakan

Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

(PENANDATANGANAN SURAT PERNYATAAN)

#### **KETUA RAPAT:**

Pimpinan/Anggota Komisi III DPR RI  
Saudara calon Kapolri  
Serta hadirin yang kami hormati

Dengan telah ditandatangani surat pernyataan oleh saudara calon Kapolri maka selesai pula kegiatan uji kelayakan atau *Fit and Proper Test* kita pada hari ini. Apabila tidak ada hal yang perlu dibicarakan lagi uji kelayakan

dapat kita akhiri dan kita skors sampai dengan pukul 16.00 WIB. Setelah itu dilanjutkan kembali rapat pleno pukul.

Oke, saya ralat sampai pukul 15.00 WIB setelah itu dilanjutkan kembali rapat pleno Komisi III DPR RI dengan agenda pandangan fraksi-fraksi dalam rangka menyetujui atau menolak pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan Kapolri pada pukul 15.00 WIB siang nanti. Rapat kami skors.

(RAPAT DI SKORS PUKUL 13.26 WIB)

Jakarta, 20 Januari 2021

a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,

NOVIANTI, S.E.  
NIP. 196711041988032001